



BUPATI MAGELANG  
PROVONSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR 34 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG ,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penataan kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, telah ditetapkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 40 Tahun 2006 tentang Pedoman Pola Klasifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, maka Peraturan Bupati Magelang Nomor 40 Tahun 2006 tentang Pedoman Pola Klasifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53); Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2008 Nomor 30);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 41 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 41) ;
9. Peraturan Bupati Magelang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas Jabatan Struktural Pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2009 Nomor 13);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG.**

**BAB I  
PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP**

**Pasal 1**

Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang berpedoman pada ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 2**

Pedoman Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi kode-kode dalam bentuk numerik yang disusun berdasarkan masalah, yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.

**BAB II  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 3**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Magelang Nomor 40 Tahun 2006 tentang Pedoman Pola Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid  
pada tanggal 15 September 2014

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Magelang  
pada tanggal 15 September 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG  
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN DAN  
KESEJAHTERAAN RAKYAT,

ttd

AGUNG TRIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2014 NOMOR 34

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI MAGELANG  
NOMOR : 34 TAHUN 2014  
TENTANG  
PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN  
MAGELANG

PEDOMAN KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

I. UMUM

1. Klasifikasi kearsipan disusun berdasarkan masalah, mencerminkan fungsi dan kegiatan pelaksanaan tugas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang.
2. Klasifikasi diperinci secara desimal, dengan mempergunakan tiga angka dasar.
3. Klasifikasi disusun secara berjenjang dengan mempergunakan prinsip perkembangan dari umum kepada khusus dalam hubungan masalah, dengan penulisan klasifikasi sebagai berikut:

	100 : Pokok Masalah ttg PEMERINTAHAN
	140 : Sub Masalah ttg PEM DESA/KEL
	145 : Sub Sub Masalah ttg ADM DESA/KEL

4. Rincian Klasifikasi yang menampung masalah-masalah fasilitatif dan substantif SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang, adalah

**000 UMUM**

- 010 URUSAN DALAM
- 020 BARANG DAN JASA
- 030 KEKAYAAN DAERAH
- 040 PERPUSTAKAAN/DOKUMEN/KEARSIPAN/SANDI
- 050 PERENCANAAN DAN EVALUASI
- 060 ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN
- 070 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
- 080 KONPERENSI/RAPAT KOORDINASI
- 090 PERJALANAN DINAS

**100 PEMERINTAHAN**

- 110 PEMERINTAH PUSAT
- 120 PEMERINTAH PROVINSI
- 130 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA
- 140 PEMERINTAH DESA/KELUARAHAAN
- 150 LEGISLATIF MPR/DPR/DPD
- 160 DPRD PROVINSI
- 170 DPRD KABUPATEN/KOTA
- 180 HUKUM
- 190 HUBUNGAN LUAR NEGERI

**200 POLITIK**

- 210 KEPARTAIAN

- 220 ORGANISASI KEMASYARAKATAN
- 230 ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL
- 240 ORGANISASI PEMUDA
- 250 ORGANISASI BURUH, TANI DAN NELAYAN
- 260 ORGANISASI WANITA
- 270 PEMILU, PILKADA
- 280 PENGAWASAN PEMILU/PILKADA
  
- 300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM**
- 310 PERTANAHAN
- 320 KEMILITERAN/TNI
- 330 KEAMANAN
- 340 PERLINDUNGAN MASYARAKAT
- 350 KEJAHATAN
- 360 BENCANA
- 370 KECELAKAAN
- 380 PENDAMPINGAN, REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI
- 390 KERJASAMA BPBD DENGAN INSTANSI LAIN
  
- 400 KESEJAHTERAAN RAKYAT**
- 410 PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN
- 420 PENDIDIKAN
- 430 KEBUDAYAAN
- 440 KESEHATAN
- 450 AGAMA
- 460 SOSIAL
- 470 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
- 480 MEDIA MASSA
  
- 500 PEREKONOMIAN**
- 510 PERDAGANGAN
- 520 PERTANIAN
- 530 PERINDUSTRIAN
- 540 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
- 550 PERHUBUNGAN
- 560 TENAGA KERJA
- 580 PERBANKAN MONETER
- 590 AGRARIA
  
- 600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN**
- 610 PENGAIRAN
- 620 JALAN
- 630 JEMBATAN
- 640 BANGUNAN
- 650 TATA RUANG KOTA
- 660 TATA LINGKUNGAN
- 670 KETENAGAAN
- 690 AIR MINUM
  
- 700 PENGAWASAN**
- 710 BIDANG PEMERINTAHAN
- 720 BIDANG POLITIK
- 730 BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN
- 740 BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
- 750 BIDANG PEREKONOMIAN
- 760 BIDANG PEKERJAAN UMUM
- 770 PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK
- 780 BIDANG KEPEGAWAIAN

790 BIDANG KEUANGAN

**800 KEPEGAWAIAN**

810 PENGADAAN

820 MUTASI

830 KEDUDUKAN

840 KESEJAHTERAAN PEGAWAI

850 CUTI

860 PENILAIAN

870 TATA USAHA KEPEGAWAIAN

880 PEMBERHENTIAN

890 PENDIDIKAN PEGAWAI

**900 KEUANGAN**

910 ANGGARAN

920 AKUNTANSI

930 PERBENDAHARAAN

940 PEMBINAAN KEBENDAHARAAN

950 PENGELOLAAN KAS DAERAH

960 EVALUASI DAN PENGENDALIAN

970 PENDAPATAN

## II. RINCIAN

<b>KODE</b>	<b>KLASIFIKASI</b>
<b>000</b>	<b>UMUM</b>
001	Lambang
001.1	Garuda
001.2	Bendera Kebangsaan
001.3	Daerah (Propinsi/Kabupaten/Kota)
001.4	Bandir/Umbul-Umbul
002	Tanda Kehormatan/Penghargaan (Khusus untuk Non PNS)
002.1	Bintang
002.2	Satyalencana
002.3	Satyakarya Nugraha
002.4	Penghargaan Secara Adat
002.5	Penghargaan lainnya (Kalpataru, Upakarti, Adipura dan sebagainya)
003	Hari Raya/Besar
003.1	Nasional (17 Agustus, Hari Pahlawan, Hari Anak, HKSN dan sebagainya)
003.2	Keagamaan
003.3	Hari Ulang Tahun/HUT (Hari Jadi Provinsi/Kabupaten/Kota)
004	Ucapan
004.1	Terima Kasih
004.2	Selamat
004.3	Mohon Diri
004.4	Bela Sungkawa
004.5	Ucapan lainnya
005	Undangan
006	Tanda Jabatan
006.1	Pamong Praja
006.2	Pejabat lainnya
<b>010</b>	<b>URUSAN DALAM</b>
011	Gedung Kantor termasuk Instalasi

- 011.1 Listrik
- 011.2 Telepon
- 011.3 Otomasi
- 011.4 Air Minum
- 011.5 Hidrant
- 011.6 Alarm
- 011.7 Internet

- 012 Rumah Dinas
- 013 Akomodasi/Persinggahan (Mess/Wisma/Hotel)
- 014 Rumah Susun/Apartemen
- 015 Peminjaman Sarana Prasarana Kantor (Ruangan, Gedung, Kendaraan, LCD, Laptop dan lain-lain)
- 016 Pengurusan Kendaraan Dinas
- 017 Keamanan/Ketertiban Kantor
- 018 Kebersihan Kantor
- 019 Protokol
- 019.1 Upacara Bendera
- 019.2 Tata Tempat
- 019.21 Pemasangan Gambar Presiden/Wakil Presiden
- 019.3 Audiensi
- 019.4 Penerimaan Tamu
- 019.5 Kerjasama

**020 BARANG DAN JASA**

- 021 Penawaran
  - 021.1 Penawaran Barang
  - 021.2 Penawaran Jasa
- 022 Barang
  - 022.1 Barang Bergerak
  - 022.2 Barang Tidak Bergerak
- 023 Jasa
  - 023.1 Konsultan Perencanaan
  - 023.2 Konsultan Pengawasan
- 024 -



- 025 -
- 026 -
- 027 Pengadaan termasuk Pengumuman Pengadaan, Penunjukan, Lelang
- 027.1 Prakuifikasi: Rapat Persiapan, HPS, Penjelasan Pekerjaan/Anwijzing, Negosiasi, Evaluasi
- 027.2 SPK, Kontrak/Amandemen/Addendum, Teguran
- 027.3 Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
- 027.4 Serah Terima Pekerjaan
- 027.5 Pemeriksaan Pekerjaan
- 027.6 Perpanjangan Waktu/Force Majore
- 027.7 Denda
- 027.8 Sanggahan
- 027.9 Pemeliharaan Barang/Jasa
- 028 Inventaris
- 028.1 Pendataan Barang Milik Negara
- 028.2 Pemeliharaan Barang Milik Negara
- 028.3 Penghapusan Barang Milik Negara
- 030 KEKAYAAN DAERAH**
- 031 Barang-barang tidak Bergerak (Bumi)
- 031.1 Tanah
- 031.2 Perkebunan
- 031.3 Pertanian
- 031.4 Hutan
- 031.5 Tambak
- 032 Barang-barang tidak Bergerak (Bangunan)
- 032.1 Gedung
- 032.2 Asrama
- 032.3 Monumen/Bangunan
- 032.4 Bangunan Lain
- 033 Tanaman
- 034 Alat-alat Berat
- 035 Hewan
- 036 Barang Persediaan dalam Gudang
- 037 Alat Pengangkut (Darat, Laut, Udara)
- 038 Peralatan Pabrik, Laboratorium
- 039 Peralatan Kesehatan/Medis (Rumah Sakit, Balai Pengobatan dan lain-lain)

**040 PERPUSTAKAAN/DOKUMEN/KEARSIPAN/SANDI**

- 041 Perpustakaan
  - 041.1 Pameran Bahan Pustaka
  - 041.2 Pengolahan (Katalog, Bibliografi)
  
  - 041.3 Sirkulasi/Layanan
    - 041.31 Keanggotaan
    - 041.32 Peminjaman dan Pengembalian
  
  - 041.4 Deposit
  - 041.5 Pemeliharaan, Pelestarian/Alih Media
  
  - 041.6 Pembinaan Perpustakaan
    - 041.61 Bantuan Buku, Rak
  
  - 041.7 Penghapusan/Penyusutan Bahan Perpustakaan
  - 041.8 Jenis-Jenis Perpustakaan (Umum, Khusus, Perguruan Tinggi, Sekolah, Keliling, Masyarakat)
  - 041.9 Kemitraan, Forum Perpustakaan, Kerjasama antar Perpustakaan
  
- 042 Dokumentasi
- 043 -
- 044 -
  
- 045 Kearsipan
  - 045.1 Pola Klasifikasi
  - 045.2 Akuisisi Arsip
  
  - 045.3 Penataan
    - 045.3 Penyusutan Arsip
      - 045.31 Jadwal Retensi Arsip
      - 045.32 Penilaian Arsip
      - 045.33 Pemindahan Arsip
      - 045.34 Penyerahan Arsip
      - 045.35 Pemusnahan Arsip
  
  - 045.4 Pembinaan Kearsipan
    - 045.41 Pengawasan
    - 045.42 Bimbingan Kearsipan

- 045.43 Pembenahan Arsip
- 045.5 Pemeliharaan, Pelestarian/Konservasi Arsip
- 045.51 Fumigasi dan Termit Control
- 045.52 Laminasi
- 045.53 Alih Media

045.6 Layanan

- 045.7 Pemasyarakatan
- 045.71 Bimbingan Teknis
- 045.72 Penerbitan Naskah Sumber Arsip
- 045.73 Sosialisasi Kearsipan
- 045.74 Pameran
- 045.75 Lomba

- 045.8 Pengembangan Sistem
- 045.81 Sistem Kearsipan
- 045.82 Sistem Jaringan Informasi Kearsipan

- 046 Sandi
- 047 Telegram, Telex, Radio, ISB
- 048 Data Elektronik
- 049 -

**050 PERENCANAAN**

meliputi RPJPN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional), RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah), Musrenbang, Musrenbangpus antar Kementerian, Musrenbangnas. Musrenbangdes

050.1 RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional)

050.11 RENSTRA (Rencana Strategi)

050.12 RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah)

050.13 RENSTRA BAPPEDA

050.2 Program Nasional

- 050.21 RKP (Rencana Kerja Pembangunan)
- 050.22 RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga)
  
- 050.23 RKP (Rencana Kerja Pembangunan Daerah)
- 050.24 Rencana Kerja SKPD
- 050.25 KUA (Kebijakan Umum Anggaran), KUPA (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran) dan PPAS (Penetapan Plafon Anggaran Sementara)
- 050.26 Jawaban Gubernur atas Pandangan Fiskal
- 050.27 Nota Keuangan
- 050.28 RKT (Rencana Kerja Tahunan)
- 050.29 RKO (Rencana Kerja Operasional)
  
- 051 Laporan
- 051.1 Laporan Berkala
- 051.2 LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
  
- 052 Evaluasi
- 052.1 Evaluasi Rencana Strategis
- 052.11 Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
- 052.12 Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
- 052.13 Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten/Kota
- 052.14 Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  
- 060 ORGANISASI / KETATALAKSANAAN**
- 061 Organisasi
- 061.1 Susunan dan Tatakerja
- 061.2 Tatatertib Kantor termasuk Pengaturan Hari dan Jam Kerja
- 061.3 Pelayanan Publik
  
- 062 Organisasi
- 062.1 Organisasi Badan Non Pemerintah
- 062.2 Organisasi Badan Internasional
- 062.3 Organisasi Semi Pemerintah
  
- 063 Kelembagaan

- 064 Ketatalaksanaan
  - 064.1 Tata Naskah Dinas
  - 064.2 Stempel Dinas dan Stempel Jabatan
  - 064.3 Papan Nama Instansi Pemerintah/Non Pemerintah
  - 064.4 Alamat-alamat Kantor dan Pejabat
  - 064.5 Ketentuan Pakaian Dinas dan Atribut
  
- 065 Tata Hubungan Kerja
- 066 Standart Operasional Prosedur
- 067 Evaluasi dan Laporan Ketatalaksanaan
  
- 068 Analisis Jabatan
  - 068.1 Pengukuran/Penilaian Beban Kerja Jabatan Struktural dan Fungsional
  - 068.2 Uraian Jabatan
  
- 069 Kinerja Aparatur
  - 069.1 Reformasi Birokrasi
  - 069.2 SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)
  
- 070 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**
- 071 Riset meliputi Perijinan bagi Peneliti, Riset Design, Pembahasan sampai dengan Laporan Akhir Riset
  
- 072 Pengembangan
  - 072.1 Krenova (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat)
  - 072.2 SINAS (Sistem Inovasi Nasional)
  - 072.3 SIDA (Sistem Inovasi Daerah) meliputi Cluster, Kabupaten/Kota, Desa Inovatif
  - 072.4 Inkubator Teknologi dan Bisnis
  - 072.5 Pameran Produk Inovasi/Ristek
  - 072.6 BTC (Bisnis Teknologi Center)
  - 072.7 Rapterk (Penerapan Iptek)
  - 072.8 HKI (Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual)
  
- 073 Kajian
  - 073.1 Kajian Stretegis/Diskusi/Forum Group Discussion (FGD)
  - 073.2 Seminar
  - 073.3 Workshop

- 073.4 Rapat Koordinasi/Rapat Teknis
- 073.5 Lokakarya
- 073.6 Diseminasi/Sosialisasi Hasil Penelitian
  
- 074 Kerjasama Penelitian
- 074.1 Instansi Pemerintah Pusat/Daerah
- 074.2 Perguruan Tinggi Negeri/Swasta
- 074.3 Lembaga Swasta Nasional, Lembaga Swadaya Masyarakat
- 074.4 Lembaga Internasional
  
- 075 Perekayasaan
- 076 Jarlitbang (Jaringan Penelitian dan Pengembangan)
- 077 Publikasi Ilmiah
- 077.1 Jurnal Ilmiah

**080 KONFERENSI/RAPAT KOORDINASI**

- 081 Gubernur
- 082 Bupati/Walikota
- 083 Komponen, Eselon lainnya termasuk Pimpinan SKPD
- 084 Instansi lainnya di Luar Kemendagri
- 085 Internasional di Dalam Negeri
- 086 International di Luar Negeri

**090 PERJALANAN DINAS**

- 091 Perjalanan Presiden/Wakil Presiden ke Daerah
- 092 Perjalanan Menteri ke Daerah
- 093 Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon I)
- 094 Perjalanan PNS meliputi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan Surat Tugas
- 095 Perjalanan Tamu Asing ke Daerah
- 096 Perjalanan Presiden/Wakil Presiden ke Luar Negeri
- 097 Perjalanan Menteri ke Luar Negeri
- 098 Perjalanan Pejabat Tinggi ke Luar Negeri
- 099 Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri

**100 PEMERINTAHAN**

**110 PEMERINTAHAN PUSAT**

- 111 Presiden meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Sumpah dan Serah Terima Jabatan
  - 111.1 Pertanggungjawaban Presiden kepada MPR
  - 111.2 Amanat Presiden/Amanat Kenegaraan
- 112 Wakil Presiden meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Sumpah dan Serah Terima Jabatan
- 113 Susunan Kabinet
  - 113.1 Reshuffle
  - 113.2 Penunjukan Menteri ad Intern
  - 113.3 Sidang Kabinet, Sidang Stabilitas Ekonomi, lihat 500.1
- 114 Kementerian Dalam Negeri
  - 114.1 Amanat Menteri Dalam Negeri
- 115 Kementerian Lainnya
- 116 Lembaga Tinggi Negara (DPA, MA, BPK)
- 117 Lembaga Non Kementerian
- 118 Otonomi Daerah
- 119 Kerjasama antar Kementerian
- 120 PEMERINTAH PROVINSI**
  - 120.1 Kebijakan Pemerintah Provinsi
  - 120.2 Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur (LKPJ)
  - 120.3 Monografi, Tambahkan Kode Wilayah
  - 120.4 Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD)
  - 120.5 Koordinasi
    - 120.51 Satuan Kerja Perangkat Daerah
    - 120.52 Instansi Vertikal
    - 120.53 Kerjasama antar Provinsi/Daerah, dan Luar Negeri
- 121 Gubernur meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dan sebagainya
- 122 Wakil Gubernur meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima dan sebagainya
- 123 Sekretaris Daerah meliputi Pencalonan, Serah Terima Jabatan

- 124 Badan-Badan Pertimbangan Daerah meliputi Muspida
- 125 Pembentukan/Pemekaran
  - 125.1 Pembentukan Daerah Otonom
  - 125.2 Pembentukan Wilayah
  - 125.3 Perubahan Batas Wilayah
  - 125.4 Pemekaran Wilayah
  - 125.5 Penambahan Ibu Kota Provinsi
  - 125.6 Pemindahan Ibu Kota Provinsi
  - 125.7 Pemberian dan Penggantian Nama Kota, Daerah, Jalan
- 126 Pembagian Wilayah
- 127 Penyerahan Urusan
- 130 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA**
  - 130.1 Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota
  - 130.2 Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati/Walikota (LKPJ)
  - 130.3 Monografi
- 130.1 Koordinasi
  - 130.11 Satuan Kerja Perangkat Daerah
  - 130.12 Instansi Vertikal
  - 130.13 Kerjasama antar Provinsi/Daerah, dan Luar Negeri (Sister City)
- 131 Bupati/Walikota meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dan sebagainya
- 132 Wakil Bupati/Walikota meliputi Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, Pemberhentian, Serah Terima Jabatan dan
- 133 Sekretaris Daerah meliputi Pencalonan dan Serah Terima
- 134 Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah meliputi Muspida
- 135 Pembentukan Daerah
  - 135.1 Pembentukan Daerah Otonom
  - 135.2 Pembentukan Wilayah
  - 135.3 Perubahan Batas Wilayah
  - 135.4 Pemekaran Wilayah
  - 135.5 Permasalahan Batas Wilayah
  - 135.6 Pemindahan Ibu Kota Kabupaten/Kotamadya
  - 135.7 Pemberian dan Penggantian Nama Kota, Daerah, Jalan



136 Pembagian Wilayah  
137 Penyerahan Urusan

138 Pemerintahan Wilayah Kecamatan  
138.1 Pembentukan Kecamatan  
138.2 Pemekaran Kecamatan  
138.3 Perluasan/Perubahan Batas Wilayah Kecamatan  
138.4 Pemindahan Ibu Kota Kecamatan  
138.5 Laporan Kecamatan

**140 PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN**

141 Pamong Desa meliputi Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara, Pelantikan, Serah Terima, Penghasilan dan sebagainya  
142 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Kelurahan  
143 Kekayaan Desa: Bondo Desa, Tanah Bengkok dan lain-lain

144 Lembaga Tingkat Desa: Rembug Desa, Badan Permusyawaratan Desa, LKMD  
145 Administrasi Desa/Kelurahan: Monografi, Peta Rupa Bumi dan lain-lain

146 Kewilayahan  
146.1 Pembentukan Desa/Kelurahan  
146.2 Pemekaran Desa/Kelurahan  
146.3 Perubahan dan Perluasan Batas Wilayah/Perluasan Desa/Kelurahan  
146.4 Perubahan Nama Desa/Kelurahan  
146.5 Permasalahan Batas Desa/Kelurahan  
146.6 Penyatuan Desa/Kelurahan  
146.7 Penghapusan Desa/Kelurahan

147 RT-RW

**150 LEGESLATIF MPR/DPR/DPD**

151 Keanggotaan MPR  
151.1 Pencalonan  
151.2 Pengangkatan

- 151.3 Pemberhentian
- 151.31 Recall
- 151.32 Meninggal
  
- 151.4 Pelanggaran
- 151.5 Pergantian antar Waktu
- 152 Keanggotaan DPR
- 152.1 Pencalonan
- 152.2 Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
  
- 152.3 Pemberhentian
- 152.31 Recall
- 152.32 Meninggal
  
- 152.4 Pelanggaran
- 152.5 Pergantian antar Waktu
  
- 153 Keanggotaan DPD
- 153.1 Pencalonan
- 153.2 Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
  
- 154 Persidangan
- 155 Kesejahteraan
- 155.1 Keuangan
- 155.2 Penghargaan
- 155.3 Pemberhentian
  
- 156 Hak
- 157 Jawaban Pemerintah
- 158 Peninjauan/Kunjungan Lapangan
- 159 Kunjungan Kerja/Study Banding/Konsultasi
  
- 160 DPRD PROVINSI**
- 161 Keanggotaan
- 161.1 Pencalonan
- 161.2 Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
- 161.3 Pelanggaran
  
- 161.4 Pemberhentian antar Waktu
- 161.41 Meninggal Dunia
- 161.42 Mengundurkan Diri

- 161.43 Diberhentikan
  
- 161.5 Alat Kelengkapan Dewan
- 161.51 Pimpinan
- 161.52 Badan Musyawarah
- 161.53 Komisi
- 161.54 Badan Legislasi Daerah
- 161.55 Badan Anggaran
- 161.56 Badan Kehormatan
- 161.57 Alat Kelengkapan Lain (Pansus)

- 162 Persidangan
- 162.1 Rapat-Rapat
- 162.11 Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa
- 162.12 Rapat Pimpinan DPRD
- 162.13 Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Badan Legislasi, Rapat Badan Kehormatan, Rapat Pansus
- 162.14 Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Konsultasi
- 162.15 Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Pemandangan Umum
- 162.16 Rapat Fraksi
  
- 162.2 Fraksi
- 162.3 Tata Tertib
- 162.4 Kode Etik
- 162.5 Reses
- 162.6 Peninjauan/Kunjungan Lapangan
- 162.7 Kunjungan Kerja/Study Banding/Konsultasi

- 163 Kesejahteraan
- 163.1 Keuangan
- 163.2 Penghargaan
- 164 Hak

**170 DPRD KABUPATEN/KOTA**

- 171 Keanggotaan

- 171.1 Pencalonan
- 171.2 Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah
- 171.3 Pelanggaran
  
- 171.4 Pemberhentian antar Waktu
- 171.41 Meninggal Dunia
- 171.42 Mengundurkan Diri
- 171.43 Diberhentikan
- 171.5 Alat Kelengkapan Dewan
- 171.51 Pimpinan
- 171.52 Badan Musyawarah
- 171.53 Komisi
- 171.54 Badan Legislasi Daerah
- 171.55 Badan Anggaran
- 171.56 Badan Kehormatan
- 171.57 Alat Kelengkapan Lain (Pansus)
  
- 172 Persidangan
- 172.1 Rapat-Rapat
- 172.11 Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa
- 172.12 Rapat Pimpinan DPRD
- 172.13 Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggaran, Rapat Badan Legislasi, Rapat Badan Kehormatan, Rapat Pansus
  
- 172.14 Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Konsultasi
- 172.15 Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Pemandangan Umum
- 172.16 Rapat Fraksi
  
- 172.2 Fraksi
- 172.3 Tatatertib
- 172.4 Kode Etik
- 172.5 Reses
- 172.6 Peninjauan/Kunjungan Lapangan
- 172.7 Kunjungan Kerja/Study Banding/Konsultasi
  
- 173 Kesejahteraan
- 173.1 Keuangan
- 173.2 Penghargaan

174 Hak

**180 HUKUM**

180.1 Konstitusi

180.11 Dasar Negara

180.12 Undang-Undang Dasar

180.13 Undang-Undang

180.14 Peraturan Pemerintah

180.15 Perundangan Tingkat Kepresidenan

180.151 Keputusan Presiden

180.152 Peraturan Presiden

180.153 Instruksi Presiden

180.16 Perundangan Tingkat Kementerian

180.161 Keputusan Menteri

180.162 Peraturan Menteri

180.163 Instruksi Menteri

180.17 Perundangan Tingkat Provinsi

180.171 Peraturan Daerah

180.172 Keputusan Gubernur

180.173 Peraturan Gubernur

180.174 Instruksi Gubernur

180.18 Perundangan Tingkat Kabupaten/Kota

180.181 Peraturan Daerah

180.182 Keputusan Bupati

180.183 Peraturan Bupati

180.184 Keputusan Wakil Bupati

180.185 Peraturan Wakil Bupati

180.186 Keputusan Kepala SKPD

180.19 Perundangan Tingkat Desa

180.191 Peraturan Desa

180.192 Keputusan Kepala Desa

180.2 Tap MPR

180.3 Konvensi

- 181 Perdata
  - 181.1 Tanah
  - 181.2 Rumah
  
  - 181.3 Utang-Piutang
    - 181.31 Gadai
    - 181.32 Hipotik
  
  - 181.4 Notaris
  
- 182 Pidana
  - 182.1 Tindak Pidana Umum
  - 182.2 Tindak Pidana Khusus
  
- 183 Peradilan
  - 183.1 Jenis-jenis Peradilan
    - 183.11 Peradilan Umum
      - 183.111 Peradilan Negeri Tingkat Pertama
      - 183.112 Pengadilan Tinggi
      - 183.113 Mahkamah Agung
  
    - 183.12 Peradilan Agama Islam
      - 183.121 Pengadilan Agama Islam Tingkat Pertama
      - 183.122 Pengadilan Tinggi Agama Islam
      - 183.123 Mahkamah Agama Islam Agung
  
    - 183.13 Peradilan Militer
      - 183.131 Mahkamah Militer Tingkat Pertama
      - 183.132 Mahkamah Militer Tinggi
      - 183.133 Mahkamah Militer Agung
  
    - 183.14 Peradilan Tata Usaha Negara
      - 183.141 Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama
      - 183.142 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
      - 183.143 Mahkamah Tata Usaha Negara Agung
  
    - 183.15 Peradilan Tindak Pidana Korupsi
    - 183.16 Peradilan Hak Asasi Manusia
    - 183.17 Mahkamah Konstitusi

- 183.18 Komisi Yudisial
- 183.19 Ombustmen
  
- 183.2 Upaya Hukum
- 183.21 Banding
- 183.22 Kasasi
- 183.23 Derden Verzet
- 183.24 Peninjauan Kembali
- 183.25 Grasi, Amnesti, Abolisi
  
- 183.3 Eksekusi
- 183.4 Pembinaan Hukum meliputi Kadarkum
- 183.5 Bantuan Hukum meliputi LBH
  
- 184 Hukum Internasional
  
- 185 Imigrasi
- 185.1 Visa
- 185.2 Paspor
- 185.3 Exit
- 185.4 Reentry
- 185.5 Lintas Batas/Batas antar Negara
  
- 186 Kepenjaraan
- 186.1 Registrasi Narapidana
- 186.2 Pembinaan Narapidana
- 186.3 Pembebasan Narapidana
- 186.4 Tahanan Titipan
  
- 187 Kejaksaan
- 187.1 Penuntutan Umum
- 187.2 Penuntutan Khusus
  
- 188 Hukum Adat
- 189 Hak Asasi Manusia
  
- 190 HUBUNGAN LUAR NEGERI**
- 191 Perwakilan Asing
- 192 Tamu Negara
- 193 Kerjasama Diplomatik dengan Negara Asing

- 194 Perwakilan RI di Luar negeri
- 195 PBB
- 196 Laporan Luar negeri

**200 POLITIK**

- 201 Perencanaan dan Program Pembinaan Luar Negeri
- 201.1 Pembinaan dan Pemahaman Ideologi Negara
- 201.2 Kesatuan Bangsa
- 201.3 Pelaksanaan Pembinaan Politik Dalam Negeri termasuk  
Laporannya
  
- 201.4 Keadaan Politik Luar Negeri
- 201.5 Evaluasi dan Pengawasan Pembinaan Ipoleksosbudhankam
  
- 201.6 Orde Baru
- 201.7 Orde Reformasi

**210 KEPARTAIAN**

- 211 Partai Politik
- 211.1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Parpol
- 211.2 Program Kerja, Data Kegiatan Parpol
- 211.3 Pembinaan Parpol
- 211.4 Hasil Munas/Musda Parpol
- 211.5 Struktur/Kepengurusan, Pengkaderan dan Keanggotaan  
Parpol
- 211.6 Data Inventaris dan Keuangan Parpol
  
- 212 Partai/Organisasi Terlarang
- 212.1 Keputusan Pembubaran Partai/Organisasi Terlarang
- 212.2 Daftar dan Data Pengurus Anggota Partai/Organisasi  
Terlarang
- 212.3 Ijin Meninggalkan Tempat/Domisili bagi Anggota  
Partai/Organisasi Terlarang
- 212.4 Daftar Berkala mengenai Keadaan Anggota Partai/Organisasi  
Terlarang
- 212.5 Laporan Umum mengenai Keadaan Anggota Partai/Organisasi  
Terlarang



**220 ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

- 221 Pembentukan Organisasi
  - 221.1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
  - 221.2 Kepengurusan dan Daftar Anggota Organisasi
  - 221.3 Program Kerja Organisasi
  - 221.4 Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota

- 222 Pembinaan Organisasi
  - 222.1 Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya
  - 222.2 Daftar Inventaris Kekayaan Nasional

**230 ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL**

- 231 Pembentukan Organisasi
  - 231.1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
  - 231.2 Kepengurusan dan Daftar Anggota Organisasi
  - 231.3 Program Kerja Organisasi
  - 231.4 Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota

- 232 Pembinaan Organisasi
  - 232.1 Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya
  - 232.2 Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi

**240 ORGANISASI PEMUDA**

- 241 Pembentukan Organisasi
  - 241.1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
  - 241.2 Kepengurusan dan Daftar Anggota Organisasi
  - 241.3 Program Kerja Organisasi
  - 241.4 Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota

- 242 Pembinaan Organisasi
  - 242.1 Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya
  - 242.2 Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi

**250 ORGANISASI BURUH, TANI, DAN NELAYAN**

- 251 Pembentukan Organisasi
  - 251.1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
  - 251.2 Kepengurusan dan Daftar Anggota Organisasi
  - 251.3 Program Kerja Organisasi
  - 251.4 Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota

- 252 Pembinaan Organisasi
- 252.1 Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya
- 252.2 Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi

**260 ORGANISASI WANITA**

- 261 Pembentukan Organisasi
- 261.1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
- 261.2 Kepengurusan dan Daftar Anggota Organisasi
- 261.3 Program Kerja Organisasi
- 261.4 Munas/Musda Provinsi dan Kabupaten/Kota

- 262 Pembinaan Organisasi
- 262.1 Kegiatan Organisasi dan Pelaporannya
- 262.2 Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi

**270 PEMILIHAN UMUM (PEMILU), PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)**

- 271 Pencalonan
- 272 Nomor Urut/Tanda Gambar

- 273 Kampanye
- 273.1 Dana Kampanye
- 273.2 Jadwal Kampanye

- 274 Petugas Pemilu
- 274.1 Laporan Pelaksanaan Tugas
- 274.2 Laporan Keuangan

- 275 Pemilih/Daftar Pemilih

- 276 Sarana
- 276.1 TPS
- 276.2 Kendaraan
- 276.3 Surat Suara
- 276.4 Kotak Suara
- 277 Pemungutan Suara/Penghitungan Suara

- 278 Hasil Pemilu
- 278.1 Penetapan Terpilih dan Pembagian Kursi Anggota Legislatif
- 278.2 Penetapan Pemenang Pilkada
- 279 KPU/KPUD
- 280 PENGAWASAN PEMILU/PILKADA**
- 281 Pemantauan
- 282 Pelanggaran
- 283 Senketa
- 284 Panwaslu
- 300 KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM**
- 300.1 Kebijakan Pemerintah mengenai Situasi dan Kondisi Keamanan
- 300.2 Pembinaan dan Pengaturan mengenai Larangan
- 300.3 Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan/Ancaman Keamanan/Ketertiban Umum
- 300.4 Program Kerja serta Tatacara Penanggulangan Keamanan
- 301 Koordinasi dan Kerjasama Keamanan dan Keteriban Umum (Trantibum)
- 302 Pengawasan Trantibum
- 303 Penegakan Pelaksanaan Perda
- 304 Pembinaan/Penyuluhan Pelanggaran Perda
- 305 Patroli Wilayah
- 306 Laporan Kunjungan VIP, VVIP, Tamu Asing
- 306.1 Pengamanan
- 306.2 Pengawalan
- 307 Pemberitahuan Keadaan Bahaya dan Jam Malam meliputi Pemberitahuan, Kententuan Pelaksanaan dan Pengawasan
- 310 PERTAHANAN**
- 311 Darat
- 312 Laut
- 313 Udara
- 314 Ketahanan Bangsa
- 315 Ketahanan Ekonomi

316 Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan

**320 KEMILITERAN/TNI**

321 Latihan Militer

322 Wajib Militer

323 Operasi Militer

324 Kekayaan TNI

325 Kemanunggalan TNI dengan Rakyat

**330 KEAMANAN**

331 Kepolisian

331.1 Polisi Pamong Praja

332 Huru-hara/Demonstrasi

333 Senjata Api/Tajam

334 Bahan peledak

335 Perjudian/Miras

336 Surat-surat Kaleng

337 Pengaduan Masyarakat

338 Himbauan atau Larangan

339 Ijin Keramaian, SKCK, SIM

**340 PERLINDUNGAN MASYARAKAT (LINMAS)**

340.1 Kebijakan Pemerintah mengenai Pembentukan Linmas

341 Pembinaan dan Diklat

341.1 Pengangkatan/Pemberhentian Anggota Linmas

341.2 Pendidikan/Latihan Linmas

341.3 Pelatihan PAM Swakarsa

341.4 Pendidikan/Latihan MENWA

342 Pengerahan dan Pengendalian Linmas

343 Kesejahteraan bagi Anggota Linmas

343.1 Pemberian Tali Asih bagi Anggota Linmas

343.2 Bantuan Modal Usaha bagi Anggota Linmas

343.3 Santunan Uang Duka bagi Anggota Linmas

343.4 Penghargaan bagi Anggota Linmas

344 Data Linmas, MENWA, PAM Swakarsa

344.1 Linmas Lanjut Usia

- 345 Orientasi Kesadaran Bela Negara
- 346 Kegiatan Pelaksanaan Linmas

**350 KEJAHATAN**

- 351 Makar/Pemberontakan/Terrorisme
- 352 Pembunuhan
- 353 Penganiayaan/Pencurian/Perampasan
- 354 Subversi/Penyelundupan/Narkotika
- 355 Penipuan dan Pemalsuan
- 356 Korupsi/Penyelewengan/Penyalahgunaan Jabatan
- 357 Kekerasan pada Perempuan dan Anak
- 358 Kenakalan
- 359 Kejahatan lainnya (Trafficking, Hipnotis dan lain-lain)

**360 BENCANA**

- 360.1 Pelatihan
- 360.2 Surat Keputusan
- 360.3 Berita Acara
  
- 361 Gunung Merapi/Gempa/Tsunami
- 362 Banjir/Tanah Longsor
- 363 Angin Topan
  
- 364 Kebakaran
- 364.1 Pemadam Kebakaran
  
- 365 Kekeringan
- 366 Posko Bencana
- 367 Koordinasi/Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana
- 368 MOU Pemerintah Pusat BNPB

**370 KECELAKAAN**

- 371 Latihan SAR
- 372 Latihan Ketrampilan Penyelamatan di Air dan Menyelam
- 373 Pelatihan Manajemen bagi Pejabat
- 374 Satkorlak dan Satlak PBP
- 375 Pelatihan Kemampuan Pusdalop bagi Aparat PBP
- 376 Latihan Ketrampilan Pemadam Kebakaran
- 377 Kecelakaan Darat, Laut, Udara
- 378 Investigasi/Penyelidikan Kecelakaan

379 Asuransi Kecelakaan

**380 PENDAMPINGAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI**

381 Perencanaan

381.1 Perencanaan Teknis

381.2 Rekomendasi

382 Bantuan Bencana

383 Penanggulangan Bencana dengan Pihak Lain

384 Sarana Prasarana Rehabilitasi dan Rekonstruksi

385 PUSDALOP

386 Kunjungan Lapangan

387 Relawan

388 Laporan Bencana

**390 KERJASAMA BPBD DENGAN INSTANSI LAIN**

391 Instansi Pemerintah Pusat

392 Instansi Pemerintah Daerah

393 Lembaga Internasional

394 Lembaga Non Pemerintah Nasional

**400 KESEJAHTERAAN RAKYAT**

401 Kebijakan dalam Program Pemerintah untuk Kesejahteraan

**410 PEMBANGUNAN DESA/KELURAHAN**

411 Gotong-Royong

411.1 Swadaya Gotong Royong

411.11 Pembinaan

411.12 Pungutan

411.2 Lembaga Sosial Desa (LSD)

411.3 Latihan Kerja Masyarakat

411.4 Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

411.5 Penyuluhan Masyarakat Desa

411.6 Kelembagaan Desa

411.7 Bulan Bhakti Gotong-Royong Masyarakat (BBGRM)

412 Perekonomian Desa

412.1 Produksi Desa

412.11 Pengolahan

412.12 Pemasaran

- 412.2 Pembiayaan Pembangunan Desa
- 412.21 Inventarisasi Data
- 412.22 Petunjuk/Pembinaan Pelaksanaan
- 412.23 Pelaksanaan dan Perkembangan Pembangunan
- 412.24 Bantuan/Simulasi
- 412.25 Perkreditan Desa
- 412.26 Pelaporan
- 412.27 Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)
  
- 412.3 Koperasi Desa
- 412.31 Badan Usaha Unit Desa (BUUD)
- 412.32 Koperasi Unit Desa (KUD)
  
- 413 Sarana dan Prasarana Desa
- 413.1 Pemukiman Kembali Penduduk
- 413.2 Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa
- 413.3 Perbaikan Kampung
- 413.4 Teknologi Tepat Guna (TTG)
  
- 414 Pengembangan Desa
- 414.1 Perlombaan Desa dan Kelurahan
- 414.11 Pedoman
- 414.12 Penilaian
- 414.13 Kejuaraan
- 414.14 Pembentukan desa baru
  
  
- 415 Koordinasi
- 415.1 Kerjasama
- 415.11 Luar Negeri
- 415.12 Perguruan Tinggi
- 415.13 Kementerian/Lembaga Pemerintah
- 415.14 Lembaga lainnya
  
- 420 PENDIDIKAN**
- 420.1 Kebijakan dan Program Pemerintah untuk Pendidikan

- 420.2 Pendidikan Karakter Bangsa, Wawasan Kebangsaan, Jiwa Nasionalisme dan sebagainya
- 420.3 Pendidikan Kemasyarakatan
  
- 421 Sekolah termasuk Akreditasi
  - 421.1 Pra Sekolah (PAUD, Playgroup)
  - 421.2 Sekolah Dasar
  - 421.3 Sekolah Menengah
  - 421.4 Sekolah Kejuruan
  - 421.5 Perguruan Tinggi (Sekolah Tinggi, Akademi, Universitas dan lain-lain)
  - 421.6 Kegiatan Sekolah meliputi Dies Natalis, Lustrum
  - 421.7 Kegiatan Pelajar diantaranya Reuni, Darmawisata, Widyawisata, Lomba-Lomba (LKS, Olimpiade Olah Raga dan Sains), Pelajar Teladan, Pertukaran Pelajar
  - 421.8 Sekolah Pendidikan Luar Biasa
  - 421.9 Pendidikan Luar Sekolah/Pemberantasan Buta Huruf
  
- 422 Administrasi Sekolah
  - 422.1 Persyaratan Masuk Sekolah, Testing, Ujian, OSPEK
  - 422.2 Tahun Pelajaran
  - 422.3 Hari libur
  - 422.4 Uang Sekolah diantaranya SPP, SPI
  - 422.5 Bea Siswa dan Penghargaan Siswa Berprestasi
  - 422.6 Ijazah, Sertifikat
  - 422.7 Bantuan Pendidikan: Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Khusus Murid (BKM), Bantuan Siswa Miskin (BSM)
  
- 423 Metode Belajar
  - 423.1 Kuliah
  - 423.2 Ceramah, Simposium, Seminar
  - 423.3 Diskusi
  - 423.4 Kuliah Lapangan, KKN, Magang/Praktik/PKL
  - 423.5 Kurikulum
  - 423.6 Karya Tulis, Karya ilmiah
  - 423.7 Ujian
  
- 424 Tenaga Pengajar (Guru, Dosen, Guru/Dosen Teladan, Guru/Dosen Berprestasi)



- 425 Sarana Pendidikan
  - 425.1 Bangunan Pendidikan
    - 425.11 Gedung Sekolah
    - 425.12 Kampus
    - 425.13 Pusat Kegiatan
    - 425.14 Perpustakaan
    - 425.15 Laboratorium
  - 425.2 B u k u
  - 425.3 Perlengkapan Sekolah
  - 425.4 Sistem Informasi Pendidikan
  - 425.5 Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan
  
- 426 Keolahragaan
  - 426.1 Pembinaan Keolahragaan
    - 426.11 Olah Raga Prestasi (PON, Sea Games, Kejurnas, Olympiade)
    - 426.12 Olah Raga Pendidikan (POPDA SD, Porseni dan lain-lain)
    - 426.13 Olah Raga Rekreasi/Massal (Senam, Sepeda Santai, Olah Raga Tradisional)
    - 426.14 Iptek dan Industri Olah Raga
    - 426.15 Sarana Prasarana Keolahragaan
  - 426.2 Kemitraan Olah Raga
  
- 427 Kepemudaan
  - 427.1 Pertukaran Pemuda
  - 427.2 Paskibraka
  - 427.3 Sarana Prasarana Kepemudaan meliputi Sarana Kegiatan Remaja: Gelanggang Remaja
  - 427.4 Kemitraan Pemuda
  - 427.5 Karang Taruna
  
- 428 Kepramukaan/Kepanduan
  
- 430 KEBUDAYAAN**
  - 430.1 Kebijakan dan Program Pemerintah untuk Kebudayaan
  - 430.2 Pembinaan Bidang Kebudayaan

- 431 Kesenian
  - 431.1 Cabang Kesenian (Seni Pewayangan, Seni Tari, Seni Musik, Seni Rupa, Seni Lukis dan lain-lain)
  - 431.2 Sarana
    - 431.21 Gedung Kesenian
    - 431.22 Padepokan
    - 431.23 Lembaga Adat
    - 431.24 Kegiatan Adat/Tradisi
- 432 Kepurbakalaan
  - 432.1 Museum
  - 432.2 Peninggalan Kuno
    - 432.21 Candi termasuk Pemugaran
    - 432.22 Benda
- 433 Sejarah
- 434 Bahasa
- 435 Penghayat Kepercayaan
- 440 KESEHATAN**
  - 440.1 Kebijakan dan Program Pemerintah untuk Kesehatan
  - 441 Pembinaan Kesehatan
    - 441.1 G i g i
    - 441.2 M a t a
    - 441.3 J i w a
    - 441.4 Kanker
    - 441.5 Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)
    - 441.6 Perawatan
    - 441.7 Kesehatan Masyarakat meliputi PKM, Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat melalui Media PKK, Posyandu dan sebagainya
    - 441.8 Kesehatan Ibu dan Anak
    - 441.9 Jaminan Pengaman Sosial Bidang Kesehatan (JP SBK)
      - 441.91 Jamkesmas
      - 441.92 Jamkesda
      - 441.93 Jampersal
      - 441.94 Jaminan lainnya

- 442      Obat-obatan
  - 442.1    Pengadaan
  - 442.2    Pemeriksaan Obat
  - 442.3    Penyimpanan Obat
  - 442.4    Distribusi Obat
  
  - 442.5    Pengawasan Obat
    - 442.51   Obat Generik
    - 442.52   Obat Terlarang
    - 442.53   Pemalsuan Obat
  
- 443      Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit
  - 443.1    Pencegahan Penyakit
  
  - 443.2    Pemberantasan Penyakit Menular Langsung (P.2.M.L)
    - 443.21   Kusta
    - 443.22   Kelamin, HIV, AIDS, IMS
    - 443.23   Frambusia
    - 443.24   T.B.C
    - 443.25   Kholera
    - 443.26   SARS, dan Jenis Penyakit lainnya
  - 443.3    Pemberantasan Penyakit Menular Binatang (P2B)
    - 443.31   Malaria
    - 443.32   Dengue Haemorrhagie Fever (DHF), DBD
    - 443.33   Filaria
    - 443.34   Serangga
    - 443.35   Rabies
    - 443.36   Antrak
    - 443.37   Leptosirosis
    - 443.38   Chikungunya
    - 443.39   Penyakit lainnya
  
  - 443.4    Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Tidak Menular
    - 443.41   A. Pektoris
    - 443.42   Irama Mastcmik Akut (IMA)
    - 443.43   Hipertensi
    - 443.44   Stroke
    - 443.45   Diabetes Melitus
    - 443.46   Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA Serviks
    - 443.47   Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA Mammae
    - 443.48   Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA Hepar

- 443.49 Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit CA Paru, dan Penyakit lainnya
  
- 443.5 Epidemiology dan Karantina (Epidka)
- 443.51 Imunisasi
- 443.52 Surveilanse
- 443.53 Pestisida
- 443.54 Pencemaran Udara
- 443.55 Jamban Keluarga
- 443.56 Kesehatan Institusi
  
- 443.6 Higiene Sanitasi
- 443.61 Tempat-Tempat Pembuatan dan Penjualan Makanan Minuman (TPPMM), Jasa Boga
- 443.62 Sarana Air Minum
- 443.63 Pestisida, Insektisida
- 443.64 Pencemaran
- 443.65 Jamban Keluarga, Sanitasi Rumah Tangga
- 443.66 Kesehatan Institusi, misal Poskestren, Sanitasi Masjid dan lain
- 443.67 Higiene Sanitasi CA Mammae
- 443.68 Higiene Sanitasi CA Hepar
- 443.69 Higiene Sanitasi CA Paru
  
- 443.7 Kejadian Khusus
- 443.71 Dekompensasi kordosis (Serangan Jantung)
- 443.72 Asma
- 443.73 Psikosis
- 443.74 PPOM
- 443.75 Kecelakaan Lalu Lintas
- 443.76 Kejadian Luar Biasa (KLB)
- 444 Gizi dan Pengawasan Makanan
- 444.1 Kekurangan Makanan
- 444.2 Bahaya Kelaparan, Busung Lapar, Gizi Buruk
- 444.3 Keracunan Makanan
- 444.4 Menu Makanan Rakyat
- 444.5 Gondok Endemik (GAKI)
  
- 445 RSUD, RSJ, RS Khusus
- 445.1 Pelayanan Medis termasuk Surat Keterangan, Berkaitan dengan Kondisi Pasien, Visum
- 445.11 Rawat Inap

- 445.12 Rawat Jalan
- 445.13 IGD
- 445.14 IBS
- 445.15 ICU
- 445.16 Medical Check Up (MCU)
  
- 445.2 Penunjang Medis
  - 445.21 Farmasi
  - 445.22 Rekam Medik
  - 445.23 Radiologi
  - 445.24 Gizi
  - 445.25 Laboratorium Klinik
  - 445.26 Laboratorium Patologi Anatomi, Forensik
  - 445.27 Bank Darah Rumah Sakit
  - 445.28 Sanitasi Rumah Sakit
  - 445.29 CSSD/Laundry
  
- 445.3 Keperawatan
- 445.4 Komite Medik
- 445.5 Satuan Pengawas Internal (SPI)
  
- 445.6 Mutu Rumah Sakit
  - 445.61 Akreditasi
  - 445.62 ISO
  - 445.63 Problem Solving for Better Hospital (PSBH)
  - 445.64 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
  
- 445.7 Instalasi Pengolahan Limbah (IPAL)
- 445.8 Promosi Layanan Kesehatan
- 445.9 Kasus Hukum Rumah Sakit
  
- 446 Tenaga Medis
  - 446.1 Perencanaan Tenaga Medis
    - 446.2 Pendayagunaan Tenaga Medis
    - 446.21 Perijinan untuk Tenaga Medis
    - 446.22 Kegiatan Bhakti Sosial Tenaga Medis
    - 446.23 Tenaga Kesehatan Haji Indonesia (TKHI)
  
  - 446.3 Diklat Tenaga Kesehatan/Medis

- 446.4 Diklat Tenaga Kesehatan/Paramedis
- 446.5 Pendidikan di Bidang Kesehatan termasuk Pendidikan Spesialis
  
- 447 Peralatan Kesehatan
  - 447.1 Standarisasi
  - 447.2 Penyimpanan
  - 447.3 Distribusi
  - 447.4 Perijinan Berkaitan dengan Alat Kesehatan
  
- 448 Pengobatan Alternatif
  - 448.1 Pijat
  - 448.2 Akupunktur
  - 448.3 Jamu dan Herbal
  - 448.4 Dukun
  
- 449 Lembaga Penyedia Layanan Kesehatan
  - 449.1 Puskesmas dan Puskesmas Keliling
  - 449.2 Poliklinik dan Balai Kesehatan
  - 449.3 Rumah Bersalin
  - 449.4 Posyandu
  - 449.5 Laboratorium Kesehatan
  - 449.6 Apotek
  - 449.7 Sanatorium Kesehatan
  - 449.8 Instalasi Farmasi
  - 449.9 Pusat Informasi Manajemen Kesehatan
  
- 450 AGAMA**
  - 450.1 Kebijakan dan Program Pemerintah dalam Pembinaan dan Pengawasan Bidang Keagamaan
  - 450.2 Bantuan di Bidang Keagamaan
  
- 451 I s l a m
  - 451.1 Peribadatan
    - 451.11 Sholat
    - 451.12 Zakat, Infaq, Shodaqoh
    - 451.13 Puasa
    - 451.14 Umroh dan Haji
  - 451.2 Rumah Ibadat (Masjid, Musholla, Surau)

- 451.3 Tokoh Agama
- 451.4 Pendidikan Agama
  - 451.41 Pendidikan Tinggi Agama
  - 451.42 Menengah, MTs, MA
  - 451.43 Dasar, Pra Sekolah, MI
  - 451.44 Lembaga Pendidikan Non Formal (TPQ/Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren dan lain-lain)
  - 451.45 Sarana Pendidikan meliputi Buku, Gedung Sekolah dan lain-lain
  - 451.46 Tenaga Pengajar
  - 451.47 Dakwah (Pengajian, MTQ)
- 451.5 Wakaf
- 451.6 Mazhab Agama Islam
- 451.7 Organisasi Keagamaan bukan Politik (Majelis Ulama Indonesia, Dewan Hisab Rukyat dan lain-lain)
- 451.8 Tokoh Agama, Rohaniawan (Da'i)
- 452 Kristen Protestan
  - 452.1 Peribadatan
  - 452.2 Rumah Ibadah Gereja dan lain-lain
  - 452.3 Tokoh Agama, Rohaniawan (Pendeta, Domine dan lain-lain)
  - 452.4 Mazhab Agama Kristen Protestan
  - 452.5 Organisasi Gerejani
- 453 Khatolik
  - 453.1 Peribadatan
  - 453.2 Rumah Ibadah Gereja dan lain-lain
  - 453.3 Tokoh Agama, Rohaniawan
  - 453.4 Mazhab Agama Khatolik
  - 453.5 Organisasi Gerejani
- 454 H i n d u
  - 454.1 Peribadatan
  - 454.2 Rumah Ibadah Pura dan lain-lain
  - 454.3 Tokoh Agama, Rohaniawan
  - 454.4 Mazhab Agama Hindu
  - 454.5 Organisasi Agama Hindu
- 455 B u d h a

- 455.1 Peribadatan
- 455.2 Rumah Ibadah Candi, Vihara dan lain-lain
- 455.3 Tokoh Agama, Rohaniawan
- 455.4 Mazhab Agama Budha
- 455.5 Organisasi Agama Budha
- 456 Kong Hu Cu
- 456.1 Peribadatan
- 456.2 Rumah Ibadah Klenteng dan lain-lain
- 456.3 Tokoh Agama, Rohaniawan
- 456.4 Mazhab Agama Kong Hu Cu
- 456.5 Organisasi Agama Khong Hu Cu

**460        S O S I A L**

- 461        Rehabilitasi Penyandang Cacat
- 461.1     Cacat Ganda
- 461.2     Cacat Fisik
- 461.3     Cacat Mental
- 462        Rehabilitasi Sosial
- 462.1     Gelandangan/Orang Terlantar, Anak Jalanan
- 462.2     Pengemis
- 462.3     Tuna Susila
- 462.4     Anak Nakal
- 462.5     Tuna Wisma
  
- 463        Kesejahteraan Anak dan Keluarga
- 463.1     Kesejahteraan Anak
- 463.11    Pengarusutamaan Hak-Hak Anak (PUHA)
- 463.12    Perlindungan Anak
- 463.13    Anak Asuh
  
- 463.2     Kualitas Hidup Perempuan
- 463.21    Perlindungan Perempuan
- 463.22    Ibu Teladan
- 463.23    Pengarusutamaan Gender (PUG)
  
- 464        Keperintisan dan Kepahlawanan
- 464.1     Pahlawan meliputi Penghargaan kepada Pahlawan, Tunjangan kepada Pahlawan dan sebagainya
- 464.2     Perintis Kemerdekaan meliputi Pembinaan, Penghargaan dan Tunjangan kepada Perintis Kemerdekaan
- 464.3     Cacat Veteran



- 465 Kesejahteraan Sosial
  - 465.1 Lanjut Usia
  - 465.2 Korban Kekacauan, Pengungsian, Rehabilitasi
  - 465.3 Masyarakat Miskin: Raskin, BLT dan lain-lain
  
- 466 Sumbangan Sosial
  - 466.1 Korban Bencana
    - 466.11 Jaminan Sosial
  - 466.2 Pencarian Dana untuk Sumbangan: Penyelenggaraan Undian, Ketangkasan, Bazar dan sebagainya
  - 466.3 Panti Asuhan
  
- 467 Bimbingan Sosial
  - 467.1 Masyarakat Suku Terasing meliputi Bimbingan Pendidikan, Kesehatan, Pemukiman, Pembinaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) dan sebagainya
  
- 468 P M I
  
- 469 M a k a m
  - 469.1 U m u m
  - 469.2 Pahlawan
  - 469.3 Khusus, Keluarga, Raja
  - 469.4 Krematorium
  
- 470 KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**
  - 470.1 Kebijakan dan Program Pemerintah untuk Kependudukan
  
- 471 Pendaftaran Penduduk
  - 471.1 Identitas Penduduk
    - 471.11 Biodata
    - 471.12 Nomor Induk Kependudukan
    - 471.13 Kartu Tanda Penduduk
    - 471.14 Kartu Keluarga
    - 471.15 Advokasi Identitas Penduduk
  - 471.2 Perpindahan Penduduk dalam Wilayah Indonesia
    - 471.21 Perpindahan Penduduk WNI
      - 471.211 Pindah Datang

- 471.212 Pindah Pergi
  
- 471.22 Perpindahan Penduduk WNA dalam Wilayah Indonesia
- 471.23 Perpindahan Penduduk WNA dan WNI Tinggal Sementara
- 471.24 Daerah Terbelakang
- 471.25 Bedol Desa
  
- 471.3 Perpindahan Penduduk antar Negara
- 471.31 Penduduk Indonesia ke Luar Negeri
- 471.32 Orang Asing Tinggal Sementara
- 471.33 Orang Asing Tinggal Tetap
- 471.34 Perpindahan Penduduk antar Negara di Wilayah Perbatasan antar Negara (Pelintas Batas Tradisional)
  
- 471.4 Pendaftaran Pengungsi dan Penduduk Rentan
- 471.41 Akibat Bencana Alam
- 471.42 Akibat Kerusakan Sosial
- 471.43 Pendaftaran Penduduk Daerah Terbelakang
- 471.44 Pendaftaran Penduduk Rentan
  
- 472 Pencatatan Sipil
- 472.1 Kelahiran Kematian dan Advokasi
- 472.11 Kelahiran
- 472.12 Kematian
- 472.13 Advokasi
  
- 472.2 Perkawinan, Perceraian dan Advokasi
- 472.21 Perkawinan Agama Islam
- 472.22 Perkawinan Agama Non Islam
- 472.23 Perceraian Agama Islam
- 472.24 Perceraian Agama Non Islam
- 472.25 Advokasi
  
- 472.3 Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pembatalan Akta dan Advokasi
- 472.31 Pengangkatan Anak
- 472.32 Pengakuan Anak
- 472.33 Pengesahan Anak
- 472.34 Perubahan Akta

- 472.35 Pembatalan Akta
- 472.36 Advokasi
  
- 472.4 Pencatatan Kewarganegaraan
- 472.41 Akibat Perkawinan
- 472.42 Akibat Kelahiran
- 472.43 Non Perkawinan/Non Kelahiran
- 472.44 Naturalisasi
- 472.45 Perubahan WNI ke WNA
  
- 473 Informasi Kependudukan
- 473.1 Teknologi Informasi
- 473.2 Pengolahan Data Kependudukan
- 473.21 Pendaftaran Penduduk
- 473.22 Kejadian Vital Pendudukan
- 473.23 Pendudukan Non Registrasi
- 473.3 Pelayanan Informasi Kependudukan
  
- 474 Perkembangan Penduduk
- 474.1 Pengarahan Kualitas Penduduk
- 474.11 Struktur Jumlah
- 474.12 Komposisi
- 474.13 Fertilitas
- 474.14 Kesehatan Reproduksi
- 474.15 Morbiditas Penduduk
- 474.16 Mortalitas Penduduk
  
- 474.2 Pengembangan Kuantitas Penduduk
- 474.21 Anak dan Remaja
- 474.22 Penduduk Usia Produktif
- 474.23 Penduduk Lanjut Usia
- 474.24 Gender
  
- 474.3 Penataan Persebaran Penduduk
- 474.31 Migrasi antar Wilayah
- 474.32 Urbanisasi
  
- 474.4 Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk
- 474.5 Pengembangan Wawasan Kependudukan

- 475 Transmigrasi
- 475.1 Penyiapan Informasi Daerah Transmigrasi
- 475.11 Informasi Potensi Peluang Bekerja dan Berusaha di Daerah Transmigrasi
- 475.12 Perbandingan Potensi Daerah Asal dan Daerah Transmigrasi
  
- 475.13 Pemasyarakatan/Sosialisasi Transmigrasi
- 475.14 Peran serta Lembaga dan Instansi Terkait serta Media Massa dalam Penyampaian Informasi Transmigrasi
- 475.15 Publikasi Transmigrasi melalui Pameran dan Kesenian
- 475.16 Bimbingan dan Penyuluhan Transmigrasi bagi Masyarakat Daerah Asal dan Daerah Transmigrasi
- 475.17 Kerjasama di Bidang Transmigrasi
- 475.18 Kepulangan Transmigrasi karena Daerah Terjadi Konflik
  
- 475.2 Pemukiman Transmigrasi
- 475.21 Penggunaan Tanah Pemukiman Transmigrasi
- 475.22 Pengembangan, Struktur Wilayah dan Analisa Data Wilayah Transmigrasi
- 475.23 Tata Ruang Satuan Kawasan Pengembangan, Studi Kelayakan dan Dampak Lingkungan Transmigrasi
- 475.24 Teknis Ruang Satuan Pemukiman dan Lokasi/Peta Informasi Pemukiman
- 475.25 Standarisasi dan Spesifikasi Teknis Rumah Transmigran, Fasilitas Umum/Sosial dan Jaringan Transportasi
- 475.26 Tanah Pemukiman, Pengadaan Areal Tanah dan Pembebasannya, Identifikasi, Pengukuran dan Pembuatan
- 475.27 Penyelesaian Masalah Tanah di Lokasi Pemukiman Transmigrasi
  
- 475.28 Tata Ruang Pemukiman Transmigrasi
- 475.281 Rancangan dan Pemanfaatan Areal Tanah
- 475.282 Rancangan Kapling TSM
- 475.283 Pengukuran dan Pembagian Lahan Pekarangan, Lahan Usaha dan Fasilitas Umum
- 475.284 Penyelesaian Kekurangan Lahan Usaha kepada Transmigran dan Sengketa Tanah

- 475.285 Inventarisasi Penataan Kembali dan Penggunaan Areal Tanah
- 475.286 Pengukuran Batas Unit Pemukiman
- 475.287 Penyelesaian Perubahan Areal dan Urusan Perijinan Pemanfaatan Areal Tanah
- 475.29 Sarana Pemukiman Transmigrasi
- 475.291 Pembinaan dan Pengendalian, Penyiapan Bangunan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga dan Fasilitas Umum
- 475.292 Pembinaan dan Pengendalian Penyiapan Sarana Air Bersih
- 475.293 Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Sumber Energi
- 475.294 Pembinaan dan Pengendalian Peningkatan Sarana
- 475.295 Pembinaan, Pengendalian dan Teknis Peningkatan Potensi Lahan dan Lingkungan
- 475.3 Pengerahan, Pemindahan dan Penempatan
- 475.31 Pengkajian dan Pengembangan Metode Pengerahan dan Penempatan
- 475.32 Teknis Penyuluhan dan Motivasi dalam Pengerahan dan Penempatan
- 475.33 Pengerahan, Pemindahan dan Penempatan
- 475.331 Pendaftaran dan Seleksi Calon Transmigran
- 475.332 Berkas Persyaratan dan Administrasi Calon Transmigran
- 475.333 Transmigran yang Dinyatakan Lulus Penyaringan
- 475.34 Pemberangkatan Transmigran
- 475.341 Pengangkutan Transmigran melalui Laut, Udara dan Darat
- 475.342 Jadwal dan Tempat Pelaksanaan Pemberangkatan
- 475.343 Pelaksanaan Pengurusan Pemberangkatan
- 475.344 Pelaksanaan Perjalanan Transmigran
- 475.345 Pengaturan Rute Pemberangkatan
- 475.346 Alokasi Penempatan dan Surat Perintah Pemberangkatan
- 475.35 Penempatan Transmigran
- 475.351 Kesiapan Lokasi dan Daya Tampung
- 475.352 Pendataan Transmigran di Lokasi yang masih Dibina

- 475.353 Data Transmigran yang Meninggalkan Lokasi di setiap UPT
- 475.354 Pemantauan Penempatan Transmigrasi Pengganti
- 475.4 Penampungan Transmigrasi (transito), dan Pelatihan
  - 475.41 Pelatihan Transmigran
    - 475.411 Program Pengajaran dan Metode Pelatihan
    - 475.412 Penyusunan Silabus dan Modul Pelatihan
    - 475.413 Penyusunan Calon Peserta/Pelatih
  - 475.42 Penampungan Transmigran di Transito
    - 475.421 Pelayanan Kesehatan bagi Transmigran
    - 475.422 Pelayanan Makanan bagi Transmigran
    - 475.423 Pelayanan Perbekalan/Peralatan bagi Transmigran
- 475.5 Pembinaan Masyarakat Transmigrasi
  - 475.51 Identifikasi dan Penjajagan Pembinaan
    - 475.511 Identifikasi, Analisis Data Pedoman Pelaksanaan Rencana Teknis Pembinaan Tahap Penyesuaian
    - 475.512 Identifikasi, Analisis Data Pedoman Pelaksanaan Rencana Teknis Pembinaan Tahap Pengembangan
    - 475.513 Identifikasi, Analisis Data Pedoman Pelaksanaan Rencana Teknis Pembinaan Tahap Pembinaan
  - 475.52 Pembinaan Pendidikan
    - 475.521 Penyediaan/Penyiapan Sarana dan Usaha Pengembangan Pendidikan
    - 475.522 Pelaksanaan Penyiapan Tenaga Pendidikan dan Status
  - 475.53 Pelaksanaan Peningkatan Partisipasi Masyarakat
- 474.54 Pembinaan Kesehatan
  - 471.541 Penyediaan Sarana Kesehatan dan KB
  - 475.542 Penanggulangan Penyakit dan Kejadian Luar Biasa
  - 475.543 Pendistribusian Bantuan Pangan
  - 475.55 Pembinaan Rokhani
    - 475.551 Bimbingan Mental Spiritual dan Penyediaan Petugas Agama
    - 475.552 Bimbingan Adaptasi Masyarakat
    - 475.553 Bimbingan Pelaksanaan Menumbuhkan Interaksi Sosial

- 475.56 Pelayanan Pos di Daerah Transmigrasi
- 475.57 Penyerahan UPT yang Layak untuk Diserahkan
- 475.58 Penilaian Transmigrasi Teladan
- 475.59 Pemantauan dan Penilaian Kelayakan Usaha

- 476 Keluarga Berencana
- 476.1 Alat kontrasepsi
- 476.2 Pelayanan KB meliputi KB Lestari, KB Mandiri
- 476.3 Penyuluhan Lapangan KB (PLKB)
- 476.4 Pos KB Desa
- 476.5 Akseptor KB

## **480 MEDIA MASA**

- 481.1 Kebijakan dan Program Pemerintah dalam Bidang Media Massa
- 481.1 Media Cetak meliputi Perijinan hingga Pencabutan Ijin apabila terjadi Pelanggaran
- 481.1 Surat Kabar
- 481.2 Majalah
- 481.3 Buletin
- 481.4 Jurnal
  
- 481.5 Press Release, Klarifikasi Berita, Press Statistik
- 481.51 Perindustrian Perdagangan termasuk 9 Harga Pokok
- 481.52 Perekonomian dan Perbankan
- 481.53 Bidang lainnya
  
- 481.6 Layanan Informasi/Leaflet
- 481.7 Masukan Analisis Gubernur

- 482 Media Elektronik meliputi Perijinan hingga Pencabutan Ijin apabila terjadi Pelanggaran
- 482.1 Radio
- 482.2 Televisi
- 482.3 Film Dokumenter
- 482.4 Pengawasan Lembaga Penyiaran
- 482.5 Kelompok Pemantau Isi Siaran
- 482.6 Pengkajian Isi Siaran

- 482.7 SDM Penyiaran
- 483 Periklanan
- 483.1 Ketentuan Pemasangan Reklame
- 483.2 Pameran
  
- 484 Kewartawanan/Jurnalistik
- 484.1 Pembentukan Organisasi Profesi
- 484.2 Kasus-Kasus Kewartawanan
- 484.3 Penyalahgunaan Profesi
- 484.4 Bantuan kepada/dari Organisasi Profesi Wartawan
- 484.5 Musyawarah Wartawan Indonesia
- 484.6 Pendidikan Jurnalistik Khusus Wartawan
- 484.7 Temu Pers/Konferensi Pers
- 484.8 Pers Tour
- 484.9 Kunjungan Wartawan Asing
  
- 485 Penyuluhan Masyarakat
- 485.1 Publikasi
- 485.2 Pendirian Information Center
  
- 486 Pembinaan Bidang Infokom
- 486.1 Training Fotografi
- 486.2 Training Berita Jurnalistik
- 486.3 Bintek Infokom
- 486.4 Rakorda Infokom
- 486.5 Rakor Pengendalian Kegiatan
- 486.6 Pengelolaan Website Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
  
- 487 Hubungan Antar Lembaga
- 487.1 Non Pemerintah
- 487.11 Wahana Komunikasi Masyarakat
- 487.12 Lembaga Komunikasi Masyarakat
  
- 487.2 Lembaga Pemerintah
- 487.21 Pertemuan Bakohumas dan Kehumasan
- 487.22 Pengolaan Informasi dan Dokumentasi (PID)
  
- 487.3 Luar Negeri
- 487.31 Promosi Luar negeri
- 487.32 Kunjungan Wartawan Asing



- 488 Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Informasi
  
- 489 Sistem Naskah Sosialisasi Kegiatan Gubernur
- 489.1 Himpunan Naskah Sambutan, Himpunan Paparan, Himpunan Keynote Speaker, Himpunan Rubrik dan Himpunan Dialog Interatif
- 489.2 Dialog Interaktif
- 489.3 Rubrik
- 489.4 Materi/Pointers Sambutan, Paparan, Naskah Keynote Speaker, Rubrik dan Dialog Interaktif
- 489.5 Pembuatan Kolom Khusus Hasil-Hasil Pembangunan
  
- 500 PEREKONOMIAN**
- 500.1 Dewan Stabilitas
  
- 501 Pengadaan Pangan
- 502 Pengadaan Sandang
- 503 Perizinan pada umumnya. Untuk Perizinan Sesuatu Bidang, Klasifikasi pada Masalahnya
  
- 510 PERDAGANGAN**
- 510.1 Promosi Perdagangan
- 510.11 Pekan Raya
- 510.12 Iklan
- 510.13 Pameran
- 510.14 Event-event
- 510.15 Lomba-Lomba (Lomba Desain, Busana, Kerajinan)
  
- 510.2 Pelelangan, Distribusi
- 510.21 Pemasaran Sembako
- 510.22 Pemasaran Hasil Industri
- 510.23 Penentuan Harga Pokok
  
- 510.3 Bina Usaha dan Sarana Perdagangan
- 510.31 Rencana dan Program Kerja
- 510.32 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi
- 510.33 Pelaksanaan Teknis
- 510.34 Pemantauan
- 510.35 Evaluasi dan Pelaporan
  
- 510.4 Perijinan HO, Gangguan, Reklame dan lain-lain

- 510.41 Penerbitan SIUP
- 510.42 Perpanjangan
- 510.43 Ijin Prinsip
- 510.44 Rekomendasi
  
- 510.5 Perdagangan antar Pulau
- 510.51 Kerjasama Bahan Baku
- 510.52 Industri Pemasaran
- 510.53 Kontrak
  
- 510.6 T e r a
- 510.61 Tera dan Tera Ulang
- 510.62 Takaran
- 510.63 Timbangan
- 510.64 Kalibrasi
- 510.65 Cap Tanda Tera
- 510.66 Biaya Tera
  
- 510.7 Bantuan Peralatan
- 510.71 Proposal
- 510.72 Surat Perjanjian/Kontrak
- 510.73 Serah Terima
  
- 510.8 Perijinan/Rekomendasi Tanda Pabrik
  
- 510.9 Kemetrologian
- 510.91 Standart Tingkat Tiga
- 510.92 Standart Kerja Satuan Ukuran
  
- 510.93 Ukuran Metrologi
- 510.931 Peralatan
- 510.932 Laboratorium Metrologi Legal
- 510.933 Tanki Ukur Mobil
- 510.934 Meter Taxi
- 510.935 KWH Meter termasuk di dalamnya Listrik dan PDAM
- 510.936 SPBU
  
- 511 Pemasaran

- 511.1 Sembilan Bahan Pokok, Tambahkan Kode Wilayah Beras, Garam, Minyak Tanah, Minyak Goreng, Sabun dan lain-lain
  
- 511.2 P a s a r
- 511.3 Pertokoan, Kali Lima, Kios
- 511.4 Pusat Perbelanjaan
  
- 512 Ekspor
- 512.1 Ekspor Hasil Industri
- 512.2 Ijin Ekspor
- 512.3 Pengembangan Pasar Luar Negeri
- 512.4 Managemen Perdagangan Internasional
  
- 512.5 Ekspor Hasil Industri
- 512.51 Kebijakan
- 512.52 Pemasaran
  
- 512.6 Pemberitahuan Ekspor Barang
- 512.7 Pengawasan Mutu Barang
- 512.8 Eksportir Terdaftar
- 512.9 Evaluasi dan Pelaporan
  
- 513 Impor
- 513.1 Ijin Impor
- 513.11 Pemberian Ijin
- 513.12 Pengendalian Ijin
  
- 513.2 Standar Mata Dagang Impor
- 513.3 Managemen Perdagangan Internasional
  
- 513.4 Kegiatan Impor
- 513.41 Pembinaan Impor
- 513.42 Pengendalian Impor
- 513.43 Pemantauan Impor
  
- 513.5 Faktor-Faktor Pendukung
- 513.6 Pengawasan Mutu Barang Impor
  
- 513.7 Penyaluran Kegiatan Impor
- 513.71 Bahan Komsumsi
- 513.72 Bahan Baku

- 513.73 Bahan Penolong
- 513.8 Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Impor
- 514 Perdagangan antar Pulau
  - 514.1 Kerjasama Bahan Baku
  - 514.2 Industri Pemasaran
  - 514.3 Kontrak
- 515 Pengembangan Potensi Perdagangan Luar Negeri
  - 515.1 Promosi dan Informasi
  - 515.2 Pameran
  - 515.3 Kerjasama
- 516 Pergudangan termasuk Tangki Penyimpanan Minyak Goreng
  - 516.1 Peti Kemas
  - 516.2 Tangki Penyimpanan
  - 517 Aneka Usaha Perdagangan
- 518 Koperasi
  - 518.1 Bina Usaha Koperasi
    - 518.11 Koperasi Pertanian
    - 518.12 Koperasi Non Pertanian
    - 518.13 Permodalan Koperasi
      - 518.131 Pemupukan Modal
      - 518.132 Pemanfaatan Modal
      - 518.133 Perbankan dan Asuransi
      - 518.134 Permodalan Luar Koperasi
      - 518.135 Kredit Program Umum
      - 518.136 Kredit Program Khusus
    - 518.14 Distribusi dan Jasa Koperasi
      - 518.141 Distribusi Bahan Pokok
      - 518.142 Distribusi Aneka Bahan
      - 518.143 Distribusi Kerjasama Niaga
      - 518.144 Jasa Angkutan
      - 518.145 Jasa Perumahan
      - 518.146 Aneka Jasa
    - 518.15 Koperasi Kelistrikan, Industri dan Telekomunikasi

- 518.2 Bina Lembaga Koperasi
- 518.21 Organisasi Koperasi
  - 518.211 Anggaran Dasar dan Akte Pendirian Koperasi
  - 518.212 Pemberian Badan Hukum Koperasi
  - 518.213 Penyelesaian Pembubaran Koperasi
  - 518.214 Keragaan Koperasi
  - 518.215 Pengakuan Koperasi Sekolah
  - 518.216 Amalgamasi
  - 518.217 Tertib Organisasi Koperasi
  - 518.218 Penyelesaian Penyelisihan/Persengketaan
  - 518.219 Bimbingan Kesadaran Hukum
  
- 518.22 Bina Hubungan Alat Kelengkapan Organisasi Koperasi
  - 518.221 Rapat Anggota Tahunan Koperasi
  - 518.222 Pengurus dan Bahan Pemeriksa
  - 518.223 Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)
  - 518.224 Badan Penasehat dan Pertimbangan Koperasi Unit Desa (BPP KUD)
  
- 518.23 Bina Tata Laksana Koperasi
  - 518.231 Klasifikasi Koperasi Pedesaan
  - 518.232 Klasifikasi Koperasi Perkotaan
  - 518.233 Klasifikasi Koperasi Sekunder
  
- 518.24 Administrasi Ketatalaksanaan Koperasi
  - 518.241 Administrasi Koperasi Pedesaan
  - 518.242 Administrasi Koperasi Perkotaan
  - 518.243 Karyawan/Manager Koperasi
  - 518.244 Sumber Daya Manusia
  - 518.245 Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST)
  - 518.246 Penyaluran Alat Sekolah
  - 518.247 Bantuan Pemda kepada Koperasi/KUD
  
- 518.25 Akuntansi
  - 518.251 Akuntansi Koperasi Pedesaan
  - 518.252 Akuntansi Koperasi Perkotaan
  - 518.253 Akuntansi Koperasi Sekunder

- 518.26 Pengawasan Koperasi
- 518.261 Pengawasan Koperasi Primer
- 518.262 Pengawasan Koperasi Sekunder
- 518.263 Koperasi Jasa Audit
- 518.264 Kerjasama Kantor Akuntan
  
- 518.27 Penyuluhan Koperasi
- 518.271 Pembinaan Kader Koperasi
- 518.272 Masyarakat Umum
- 518.273 Forum Komunikasi
- 518.274 Kelompok Tani
- 518.275 Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PKKL)
- 518.276 Penilaian Tingkat Nasional

- 518.3 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
- 518.31 Pembinaan Usaha
- 518.311 Pembinaan Usaha Mikro
- 518.312 Pembinaan Usaha Kecil
- 518.313 Pembinaan Usaha Menengah

- 518.32 Pengawasan Usaha
- 518.321 Pengawasan Usaha Mikro
- 518.322 Pengawasan Usaha Kecil
- 518.323 Pengawasan Usaha Menengah

**520 PERTANIAN**

- 521 Tanaman Pangan
- 521.1 Rencana dan Program
- 521.11 Bimas/Inmas Termasuk Kredit
- 521.12 Pelaporan dan Evaluasi Pertanian
  
- 521.2 Produksi
- 521.21 Padi
- 521.22 Palawija
- 521.23 Hortikultura (Sayuran, Buah-buahan, Tanaman Hias)
- 521.24 Panen Gagal (Puso)
  
- 521.3 Sarana Usaha Pertanian
- 521.31 Peralatan
- 521.32 Meliputi Traktor dan sebagainya

- 521.33 Pembenihan dan Pembibitan
- 521.34 Pupuk
- 521.35 Irigasi Pertanian
- 521.36 Rehabilitasi Lahan Pertanian
  
- 521.4 Perlindungan Tanaman
- 521.41 Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Pangan
- 521.411 Penyakit Tanaman Pangan
- 521.412 Hama Tanaman Pangan
  
- 521.42 Pemberantasan
- 521.421 Pestisida
- 521.422 Agensia Pengendalian Hayati
- 521.43 Tanaman Pertanian Pangan
- 521.431 Persawahan
- 521.432 Perladangan
- 521.433 Kebun
  
- 521.5 Pengusaha, Petani
- 521.6 Lahan Kritis
- 521.7 Pemasaran dan Promosi Pertanian
- 521.8 Pengembangan Sumber Daya Pertanian
  
- 522 Kehutanan
- 522.1 Perencanaan Hutan
- 522.11 Survey
- 522.111 Survey PPA
- 522.112 Survey Areal
- 522.113 Survey Pembinaan Hutan
- 522.114 Survey Potensi Hutan
  
- 522.12 Pendataan/Inventarisasi Areal Hutan
- 522.121 Data Areal Tata Guna Tanah
- 522.122 Data Areal Konservasi
  
- 522.2 Tata Guna Hutan
- 522.21 Tata Ruang Kawasan
- 522.211 Pengurusan Kawasan Hutan
- 522.212 Penafsiran Hutan
- 522.213 Mutasi Hutan

- 522.22 Tata Hutan
  - 522.221 Tata Hutan Sementara
  - 522.222 Tata Hutan Tetap
  - 522.223 Pembukaan Hutan
  
- 522.23 Pengukuran dan Pemetaan
  
- 522.3 Pengusahaan Hutan
  - 522.31 Data Areal HPH
    - 522.311 SK HPH
    - 522.312 Kerjasama
    - 522.313 Pembatalan/ Penolakan
  
  - 522.32 Modal dan Peralatan
    - 522.321 Inventarisasi Logging
    - 522.322 Inventarisasi Industri
    - 522.323 Peralatan
    - 522.324 Tenaga Kerja Pengusahaan Hutan
    - 522.325 Pemegang Saham
    - 522.326 Neraca Perusahaan
  - 522.33 Rencana Kerja
    - 522.331 KHPH
    - 522.332 RKPH
  
  - 522.34 Perpanjangan HPH
  
  - 522.35 Produksi
    - 522.351 Target Produksi
    - 522.352 Produksi Kayu
    - 522.353 Produksi Non Kayu
  
  - 522.36 Industri
    - 522.361 Industri Kayu HPH
    - 522.362 Industri Kayu Non HPH
    - 522.363 Industri Non Kayu
  
  - 522.37 Pembinaan HPH
    - 522.371 Pelanggaran dan Sanksi
  
  - 522.38 Pembangunan Hutan Tanaman Industri



- 522.381 Hutan Tanaman Industri Pulp
- 522.382 HTI Pertukangan
  
- 522.39 Iuran Hutan
  
- 522.4 Sarana Usaha
- 522.41 Standarisasi
- 522.411 Kayu
- 522.412 Non Kayu
  
- 522.42 Pengujian Hasil Hutan
  
- 522.43 Pengembangan
- 522.431 Pengembangan Perusahaan
- 522.432 Pengembangan Pemasaran
  
- 522.44 Pemasaran Hasil Hutan
  
- 522.45 Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH), Angkutan Hasil Hutan
- 522.451 Sarana dan Prasarana
- 522.452 Pembinaan dan Peningkatan Daya Hutan
  
- 522.46 Tata Usaha Hasil hutan
- 522.47 Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)
  
- 522.5 Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam
- 522.51 Konservasi Jenis
- 522.511 Satwa yang Dilindungi
- 522.512 Satwa yang tidak Dilindungi
- 522.513 Lembaga Konservasi Satwa
- 522.514 Lembaga konservasi Tumbuhan
  
- 522.52 Kawasan Konservasi
- 522.521 Cagar Alam (Termasuk Laut)
- 522.522 Suaka Margasatwa
- 522.523 Taman Wisata (Termasuk Laut)
- 522.524 Taman Nasional
- 522.525 Taman Hutan Raya/Kebun Raya
- 522.526 Taman Baru
- 522.527 Hutan Lindung

- 522.53 Pengkajian Lingkungan
- 522.531 Amdal UKL, UPL di dalam Kawasan
- 522.532 Amdal UKL, UPL di luar Kawasan
  
- 522.54 Bina Cinta Alam
- 522.541 Kelompok Pecinta Alam
- 522.542 Kader Konservasi Sumber Daya Alam
- 522.543 Penyuluhan Konservasi Sumber Daya Alam
- 522.544 LSM Lingkungan
  
- 522.55 Pengamanan Hutan
- 522.551 Jaga Wana
- 522.552 PPNS
- 522.553 Gangguan Keamanan Hutan
- 522.554 Bencana Alam
- 522.555 Kebakaran Hutan
- 522.556 Sengketa Hutan
- 522.557 Hama Dan Penyakit
- 522.558 Pestisida dan Pupuk Tanaman Hutan
- 522.559 Alat dan Mesin Kehutanan
  
- 522.6 Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan
- 522.61 Pembenihan
- 522.611 Tegakan Benih
- 522.612 Pengadaan Benih
- 522.613 Pengujian dan Penyimpanan Benih
- 522.614 Lalu Lintas Angkutan Benih
- 522.615 Pembibitan
- 522.616 Pengada dan Pengedar Bibit Bersertifikat
- 522.617 Pengada dan Pengedar Bibit Tidak Bersertifikat
  
- 522.62 Tanaman Reboisasi
- 522.621 Lahan Kritis
- 522.622 Reboisasi Lahan HPH
- 522.623 Rehabilitasi Tanah Hutan
- 522.624 Konservai Tanah dan Air
- 522.625 Pengendalian Perladangan
- 522.626 Penghijauan
- 522.627 Aneka Usaha Kehutanan

- 522.63 Perhutanan Sosial
  - 522.631 Sutera Alam
  - 522.632 Minyak kayu Putih
  - 522.633 Perlebahan
  
- 522.7 Hutan Produksi
  - 522.71 Hutan Produksi Terbatas
  - 522.72 Hutan Produksi yang dapat Dikonservasi
  
- 522.8 Kawasan Lindung
  
- 523 Perikanan dan Kelautan
  - 523.1 Rencana, Program, Statistik, Prospek dan Pelaporan Bidang Perikanan dan Kelautan
    - 523.11 Penyuluhan
    - 523.12 Teknologi
  
  - 523.2 Produksi Perikanan
    - 523.21 Standarisasi Mutu Hasil Perikanan
    - 523.22 Perikanan Budidaya: CBIB, CBIC
    - 523.23 Sertifikasi Kesehatan Ikan
  
  - 523.3 Usaha Perikanan
    - 523.31 Pelatihan Nelayan
    - 523.32 Pembinaan Wanita Nelayan
    - 523.33 Fasilitas Perijinan: SIUP, SIPI, SKP
    - 523.34 Perbenihan
  
  - 523.4 Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan
    - 523.41 Eskpor Hasil Perikanan
    - 523.42 Impor Hasil Perikanan
    - 523.43 Pemasaran Dalam Negeri
    - 523.44 Pengusahaan Perikanan
  
  - 523.5 Sarana Perikanan
    - 523.51 Pelabuhan Perikanan Pantai
    - 523.52 TPI/PPI
    - 523.53 Kesyahbandaran
    - 523.54 Peralatan Penangkapan: Kapal, Perahu, Jaring, Pump dan sebagainya

- 523.6 Pengendalian Hama dan Penyakit
- 523.61 Penyakit Ikan
- 523.62 Hama Ikan
- 523.63 Obat-obatan termasuk Sertifikasinya
  
- 523.7 Konservasi dan Suaka Laut
- 523.71 Transplantasi Bibit Karang
- 523.72 Terumbu Karang
- 523.73 Mangrove
- 523.74 Garam
- 523.75 Harta Karun dalam Laut
- 523.76 Pembinaan/Pendidikan Masyarakat Pesisir
  
- 524 Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 524.1 Produksi
- 524.11 Perbibitan
- 524.12 Penyebaran dan Pengembangan Peternakan
- 524.13 Budidaya
  
- 524.2 Usaha Peternakan
- 524.21 Pelayanan Usaha
- 524.22 Pengolahan Hasil dan Pemasaran
- 524.23 Pengembangan SDM dan Kelembagaan Peternakan
  
- 524.3 Kesehatan Hewan
- 524.31 Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan
- 524.32 Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
- 524.33 Obat-obatan Hewan
- 524.34 Pelayanan Kesehatan Hewan
  
- 524.4 Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan
  
- 524.41 Zoonis dan Kesejahteraan Hewan
- 524.42 Hygieni dan Sanitasi
- 524.43 Produk Hewani

- 524.5     Laboratorium Kesehatan Hewan
- 524.51    Penguujian Mutu Asal Hewan
- 524.52    Penguujian Mutu Produk Bahan Asal Hewan
  
- 524.6     Inseminasi Buatan
- 524.61    Produksi, Distribusi dan Pemasaran
- 524.62    Pemeliharaan Ternak dan Pelayanan Reproduksi
  
- 524.7     Pembibitan dan Budi Daya Ternak
- 524.71    Ternak Non Ruminansia
- 524.72    Ternak Ruminansia
  
- 525       Perkebunan
- 525.1     Program dan Pelaporan
- 525.11    Pelaporan
- 525.12    Monitoring
- 525.13    Statistik Perkebunan
  
  
- 525.2     Produksi
- 525.21    Karet
- 525.22    T e h
- 525.23    Tembakau
- 525.24    T e b u
- 525.25    Cengkeh
- 525.26    Kelapa/Kopra/Kelapa Sawit
- 525.27    K o p i
- 525.28    Kakao
- 525.29    Jenis Tanaman yang lain
  
- 525.3     Usaha Perkebunan
- 525.31    Benih
- 525.32    Pembibitan
- 525.33    Kelompok Tani
- 525.34    Kemitraan
- 525.35    Rekomendasi Ijin Usaha Perkebunan
- 525.36    Pemasaran Hasil Perkebunan
  
- 525.4     Perlindungan tanaman
- 525.41    H a m a

- 525.42 Pestisida
- 525.43 Agensia Pengendali Hayati
  
- 525.5 Alat dan mesin Perkebunan
- 525.51 Power Sprayer
- 525.52 Hand Sprayer
- 525.53 Polibag
- 525.54 Alat Laboratorium Perkebunan
- 525.55 Reagen
- 525.56 Sarana/Alat Produksi Perkebunan
  
- 525.6 Pengolahan Lahan
- 525.61 Terasering
  
- 526 Ketahanan Pangan
- 526.1 Program Bimbingan Massal
  
- 526.2 Pengembangan Sarana Sumber Daya
- 526.21 Pembinaan Teknologi
- 526.22 Sarana Produksi dan Permodalan
- 526.23 Kelembagaan
  
- 526.3 Agribisnis
- 526.31 Mutu hasil
- 526.32 Pengelolaan Hasil Pangan
- 526.33 Pemasaran Hasil
- 526.34 Kementrian
  
- 526.4 Distribusi Pangan
- 526.41 Sistem dan Pola Distribusi
- 526.42 Sarana dan Prasarana Distribusi
- 526.43 Pengadaan dan Cadangan Pangan
  
- 526.5 Kewaspadaan dan Keaneragaman Pangan
- 526.51 Rawan Pangan, Keamanan dan Mutu Pangan
- 526.52 Pola Konsumsi Pangan Masyarakat
- 526.53 Sistem Informasi Pangan
  
- 527 Penyuluhan

- 527.1 Sumber Daya Manusia
- 527.11 Penyuluh
- 527.12 Pelaku Utama Pelaku Utama
- 527.13 Stake Holder
  
- 527.2 Kelembagaan
- 527.21 Struktural
- 527.22 Non Struktural
- 527.23 Pelaku Utama Pelaku Usaha
- 527.24 Lembaga Profesi
  
- 527.3 Penyelenggaraan Penyuluhan
- 527.31 Program/Metode
- 527.32 Promosi/Pameran/Kampanye
- 527.33 Penghargaan/Lomba
- 527.34 Materi

**530 PERINDUSTRIAN**

- 530.1 Undang Undang Gangguan
  
- 531 Industri Logam
- 532 Industri Mesin/Elektronik
- 533 Industri Kimia/Farmasi
- 534 Industri Tekstil
- 535 Industri Makanan/Minuman
  
- 536 Aneka Industri/Perusahaan
- 536.1 Home Industri
  
- 537 Aneka Kerajinan
- 537.1 Kerajinan Rakyat
- 538 Usaha Negara
- 538.1 Perjan
- 538.2 Perum
- 538.3 Persero
  
- 539 Perusahaan Daerah

**540 ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**

- 541 Minyak dan Gas Bumi
  - 541.1 Pengusahaan
    - 541.11 Perijinan
    - 541.12 Rekomendasi
    - 541.13 Kontrak Karya
    - 541.14 Pengolahan
  - 541.2 Penyaluran
  - 541.3 Tangki, Pompa, Tanker
- 542 Energi
  - 542.1 Energi Alternatif
    - 542.11 Gas Rawa
    - 542.12 Bahan Bakar Nabati (Biofuel)
    - 542.13 Biogas
    - 542.14 Energi Baru Terbarukan
    - 542.15 Perjinan
    - 542.16 Rekomendasi
    - 542.17 Pembinaan dan Pengawasan
  - 542.2 Konservasi Energi
  - 542.3 Pemetaan Energi
  - 542.4 Rencana Umum Perencanaan Energi Daerah (RUPED)
- 543 Pertambangan, Mineral dan Batu Bara
  - 543.1 Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP)
    - 543.11 WIUP Batuan
    - 543.12 WIUP Bukan Logam
    - 543.13 WIUP Logam
    - 543.14 WIUP Batubara
  - 543.2 Rekomendasi Teknis
  - 543.3 Perijinan
    - 543.31 IUP Eksploirasi
    - 543.32 IUP Operasi Produksi
    - 543.33 IUP Operasi Produksi Khusus
    - 543.34 Ijin Usaha Jasa Pertambangan
    - 543.35 Pencabutan Ijin
  - 543.4 Pembinaan



- 543.5 Pengawasan
- 543.51 Pengawasan Usaha Pertambangan
- 543.52 Penerbitan Kegiatan Pertambangan
- 543.6 Pasca Tambang
- 543.61 Reklamasi
- 543.62 Penutupan
  
- 544 Air Tanah
- 544.1 Cekungan Air Tanah (CAT)
- 544.11 Pemetaan CAT
- 544.12 Imbuhan CAT
- 544.13 Lepasana CAT
- 544.14 Konservasi
- 544.15 Pengendalian Daya Rusak
- 544.2 Rekomendasi Teknis
- 544.3 Sumur Artesis
- 544.4 Sumur Bor
- 544.5 Sumur Gali (Pasak)
- 544.6 Pengusaha Pengebor (APATINDO)
- 544.7 Sumur Pantau
- 544.8 Harga Dasar Air/Nilai Perolehan Air
- 544.9 Hidrologi
  
- 545 Geologi
- 545.1 Pemetaan
- 545.2 Mitigasi Bencana Geologi
  
- 545.3 Vulkanologi
- 545.31 Pengawasan Vulkanologi
- 545.32 Panas Bumi
  
- 545.4 Hidrogeologi
- 545.5 Gerakan Tanah (Longsoran, Amblesan)
- 545.6 Pengawasan, Pengendalian
  
- 546 Hidrologi
- 547 Kesamudraan
- 548 Penghematan Energi

**550 PERHUBUNGAN**

- 551 Perhubungan Darat
  - 551.1 Lalu Lintas Jalan Raya, Sungai, Danau
    - 551.11 Keamanan Lalu Lintas, Rambu-Rambu
    - 551.12 Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor (Keur)
    - 551.13 Kecelakaan Lalu Lintas
  
  - 551.2 Angkutan Jalan Raya
    - 551.21 Perijinan
    - 551.22 Terminal
    - 551.23 Alat Angkutan
    - 551.24 Jembatan Timbang/Lebih Muatan
    - 551.25 Uji Mutu
  
  - 551.3 Angkutan Sungai
    - 551.31 Keselamatan, Rambu-Rambu
    - 551.32 Lalu Lintas
    - 551.33 Alur dan Kolam Pelabuhan
  
  - 551.34 Trayek
  - 551.35 Sarana/Kapal
  - 551.36 Pelabuhan
  - 551.37 Terminal
  - 551.38 Kecelakaan
  - 551.39 Perijinan
  
- 551.4 Angkutan Danau
  - 551.41 Keselamatan, Rambu-Rambu
  - 551.42 Lalu Lintas
  - 551.43 Alur dan Kolam Pelabuhan
  - 551.44 Trayek
  - 551.45 Sarana/Kapal
  - 551.46 Pelabuhan
  - 551.47 Terminal
  - 551.48 Kecelakaan
  - 551.49 Perijinan
  
- 551.5 Perkereta-apian
  - 551.51 Sarana meliputi Lokomotif, Gerbong, Bogie
  - 551.52 Prasarana (Jalan/Jembatan)
  - 551.53 Trayek

- 551.54 Angkutan Penumpang
- 551.55 Angkutan Barang
- 551.56 Keselamatan
- 551.57 Kecelakaan
- 551.58 Perawatan/Perbaikan
- 551.59 Perijinan
  
- 552 Perhubungan Laut
- 552.1 Lalu Lintas Angkutan Laut
- 552.11 Pelayaran Dalam Negeri
- 552.12 Pelayaran Luar Negeri
- 552.13 Pelayaran Haji
- 552.14 Pelayaran Charter/Wisata Turis
- 552.15 Pelayaran Khusus
- 552.16 Keamanan Lalu Lintas, Rambu-Rambu
  
- 552.2 Perkapalan-Alat Angkutan
- 552.21 Kapal Penumpang
- 552.22 Kapal Barang
- 552.23 Kapal Perang/Patroli/Negara
- 552.24 Kapal Tanker
- 552.25 Ponton/Tongkang
- 552.26 Kapal Layar
- 552.27 Kapal Layar Motor
- 552.28 Kapal Khusus Kontainer
  
- 552.3 Pelabuhan
- 552.31 Tanah/Lokasi
- 552.32 Alur Layar
- 552.33 Dermaga
- 552.34 Terminal Penumpang
- 552.35 Terminal Kontainer
- 552.36 Bangunan/Gedung/Gudang
- 552.37 Perlengkapan Tambat Labuh
- 552.38 Lapangan Penumpukan
- 552.39 Pelabuhan Khusus/Dermaga Khusus
  
- 552.4 Pengerukan/Perawatan

- 552.41 Alur Pelayaran
- 552.42 Kolam Pelabuhan
- 552.43 Reklamasi Pantai
- 552.44 Dumping Area
- 552.45 Pekerjaan Bawah Air (Salvage)
  
- 552.5 Penjagaan Pantai
- 552.51 Patroli Bandar
- 552.52 Patroli Perairan
- 552.53 Penjagaan Pantai & Penanggulangan Keselamatan di Laut (GAMAT)
  
- 552.6 Angkutan Barang
- 552.61 Pos
- 552.62 Minyak
- 552.63 Log
- 552.64 Ternak
- 552.65 Sembilan Bahan Pokok
- 552.66 Peti Kemas/EMKL
- 552.67 Muatan Umum
- 552.68 Barang Dalam Negeri, Barang Luar Negeri
- 552.69 Bongkar Muat
  
- 552.7 Keselamatan
- 552.71 Rambu-Rambu/Mercu Suar
- 552.72 Kelaikan Kapal/Pembangunan Kapal
- 552.73 Fasilitas Keselamatan/Keamanan
- 552.74 Telekomunikasi Pelayaran
- 552.75 Sertifikasi Kesempurnaan Kapal
- 552.76 Sertifikasi Awak Kapal
  
- 552.8 Kecelakaan, Gangguan
- 552.81 Kecelakaan Penumpang/Kapal
- 552.82 Kecelakaan Barang
- 552.83 Gangguan Sarana/Prasarana
- 552.84 Pembajakan/Penyelundupan
- 552.85 Pencemaran
  
- 552.9 Perijinan
- 552.91 Ijin Berlayar

552.92 Ijin Pekerjaan Bawah Air  
552.93 Ijin Pembuatan dan Perubahan Bentuk Kapal  
552.94 Ijin Pembukaan Kantor Cabang  
552.95 Ijin Usaha Angkutan Laut  
552.96 Ijin Usaha Penunjang Angkutan Laut  
552.97 Ijin Pelayanan Jasa Kepelabuhan  
552.98 Ijin Pembangunan Pelabuhan Khusus  
552.99 Ijin Pembangunan Dermaga Khusus

553 Perhubungan Udara  
553.1 Lalu Lintas Angkutan Udara  
553.11 Penerbangan Domestik  
553.12 Penerbangan Luar Negeri  
553.13 Penerbangan Haji  
553.14 Penerbangan Charter/Non Reguler  
553.15 Penerbangan Khusus/Jembatan Udara

553.2 Pelabuhan Udara  
553.21 Lokasi/Tanah  
553.22 Landasan  
553.23 Apron  
553.24 Terminal Penumpang  
553.25 Terminal Cargo  
553.26 Bangunan/Gedung  
553.27 Perlengkapan  
553.28 Parkir Kendaraan

553.3 Alat Angkutan  
553.31 Pesawat Udara  
553.32 Helikopter  
553.4 Angkutan Barang  
553.41 P o s  
553.42 Muatan Dalam Negeri  
553.43 Muatan Luar Negeri  
553.44 E M P U

553.5 Sertifikasi Kelaikan  
553.51 Kelaikan Pesawat Udara  
553.52 Kelaikan Peralatan Penumpang  
553.53 Kelaikan Personil/Awak Kapal

- 553.6 Keselamatan
- 553.61 Rambu-Rambu
- 553.62 Perakitan/Kalibrasi
- 553.63 Fasilitas/Kalibrasi
- 553.64 Telekomunikasi Penerbangan
  
- 553.7 Kecelakaan/Gangguan
- 553.71 Kecelakaan Penumpang
- 553.72 Kecelakaan Barang
- 553.73 Gangguan Sarana/Prasarana
- 553.74 Pembajakan
- 553.75 Pencemaran
  
- 553.8 Umum
- 553.81 Asuransi
- 553.82 Asosiasi
- 553.83 SATPAM
- 553.84 Rally Udara/Lomba
  
- 553.9 Perijinan
- 553.91 Ijin Terbang/Flight Approval
- 553.92 Usaha Kegiatan Penunjang Penerbangan/EMPU
- 553.93 Pembukaan Kantor Cabang
- 553.94 Rekomendasi Ketinggian Bangunan
- 553.95 Pembangunan Bandar Udara Khusus
  
- 554 Pos
- 554.1 Pembinaan
- 554.11 Kebutuhan Fasilitas
- 554.12 Rehabilitasi/Perawatan
- 554.13 Bina Usaha/Pengawasan/Penertiban
- 554.14 Standarisasi Perangkat
- 554.15 Tanah/Bangunan
- 554.16 Filateli
- 554.17 Asosiasi
- 554.18 Laporan dan Evaluasi
  
- 554.2 Pelayanan
- 554.21 Jasa Pos

- 554.22 Jasa Titipan
- 554.23 Jasa Giro
- 554.24 Benda Pos/Perangko
- 554.25 Sampul Peringatan
- 554.26 Jasa Pos Elektronik
  
- 554.3 Perijinan
  - 554.31 Rekomendasi Usaha Jasa Pos/Titipan
  - 554.32 Pembukaan Agen/Cabang
  
- 554.4 Gangguan Sarana dan Prasarana
  - 554.41 Kecelakaan
  - 554.42 Sabotase
  - 554.43 Penyelundupan
  
- 555 Teknologi Informasi
  - 555.1 Kebijakan
  
  - 555.2 Peralatan
    - 555.21 Telepon
    - 555.22 Internet/USO
    - 555.23 Telegram, Telex/SBB, Faximile
    - 555.24 Satelit, Stasiun Bumi
    - 555.25 Radio Komunikasi
  - 555.3 Sistem
  - 555.4 Pembinaan/Penertiban
  - 555.5 Perijinan
  
- 556 Pariwisata dan Rekreasi
  - 556.1 Usaha Pariwisata
    - 556.11 Usaha Jasa Pariwisata
    - 556.111 Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata
    - 556.112 Restoran dan Rumah Makan
  
  - 556.12 Ijin Usaha Obyek dan Atraksi Wisata
  
  - 556.13 Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Wisata
  
  - 556.14 Usaha Sarana Wisata
    - 556.141 Ijin Pariwisata
    - 556.142 Ijin Usaha Pariwisata

- 556.143 Ijin Usaha Jasa Pariwisata
- 556.144 Ijin Pengusaha Obyek dan Daya Tarik Wisata
- 556.145 Ijin Usaha Sarana
  
- 556.15 Wisatawan
  - 556.151 Wisatawan Nusantara
  - 556.152 Wisatawan Mancanegara
  
- 556.16 Promosi dan Informasi Pariwisata
  - 556.161 Dalam Negeri
  - 556.162 Luar Negeri
  
- 556.2 Perhotelan
  - 556.21 Status Hotel
  - 556.22 Kelas Hotel
  - 556.23 Tarif
  
- 556.3 Travel Service
  - 556.31 Pramuwisata
  - 556.32 Biro Perjalanan/Angkutan Wisata
  - 556.33 Souvenir
  - 556.34 Kemudahan Wisata (Visa, Bea Cukai, Karantina )
- 556.4 Tempat Rekreasi
  - 556.41 Obyek dan Daya Tarik Wisata
    - 556.411 Ciptaan Tuhan
    - 556.412 Hasil Karya Manusia
  
- 556.42 Rehabilitasi/Perawatan
- 556.43 Pengembangan Fasilitas
- 556.44 Tanah/Bangunan
- 556.45 Bina Usaha
  
- 556.46 Institusi
  - 556.461 Asosiasi
  - 556.462 Lembaga Kepariwisata
  
- 557 Metereologi
  - 557.1 Curah Hujan
  - 557.2 Hujan Buatan
  - 557.3 Peneropongan Bintang



**560      TENAGA KERJA**

- 560.1      Data Permintaan TKI/TKW dari Luar negeri
- 560.11     Data Persediaan TKI/TKW dari Daerah
  
- 560.2      Job Order TKI ke Luar Negeri oleh PJTKI
- 560.3      Rekrutmen Calon TKI/TKW
  
- 560.4      Seleksi Naker ke Luar negeri
- 560.41     Pendaftaran dan Seleksi Calon TKI/TKW
- 560.42     Berkas Persyaratan Calon TKI/TKW
- 560.43     Pemeriksaan dan Hasil Cek Kesehatan TKI/TKW
  
- 560.5      Persyaratan Naker TKI/TKW
- 560.51     Permohonan Rekomendasi Passport
- 560.52     Perjanjian Kerja TKI/TKW
- 560.53     Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (TKI)
- 560.54     Permohonan Fiskal ke Luar negeri
- 560.55     Pelatihan TKI/TKW
  
- 560.6      Pemberangkatan Naker
- 560.61     Pemberangkatan ke Luar Negeri
- 560.62     Pembekalan Akhir Pemberangkatan TKI/TKW ke Luar Negeri
  
- 560.63     Berita Acara Serah Terima TKI/TKW
  
- 560.7      Pemulangan Naker
- 560.71     Kepulangan TKI/TKW karena Kontraknya Habis
- 560.72     Pemulangan TKI /TKW Ilegal
- 560.73     TKI/TKW Terkena Kasus Pidana
  
- 561        Upah
- 561.1      Kegiatan dan Hasil Sidang Dewan Penelitian Pengupahan Daerah/Nasional
- 561.2      Permohonan Penanggulangan Pelaksanaan Pembayaran Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Propinsi
- 561.3      Kebutuhan Fisik Minimum
- 561.4      Perhitungan Upah Kerja (termasuk di dalamnya Upah Lembur)
  
- 561.5      Laporan Data Remittance
- 561.6      Pembayaran Gaji/Upah TKI/TKW

- 562 Penempatan
  - 562.1 Penempatan Naker Penempatan Naker Mandiri Terdidik (TKMT)
    - 562.11 Penempatan Naker Mandiri Profesional (TKMP)
    - 562.12 Penempatan Naker Non Terdidik dan Non Profesional
    - 562.13 Pengembangan Kesempatan Berusaha/Perluasan Kerja
  - 562.2 Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)
  - 562.3 Lembaga Penyalur Naker
    - 562.31 Ijin Pendirian Lembaga Penyalur Naker antar Kerja Lokal/Daerah dan antar Kerja Negara (AKAN)
    - 562.32 Data Evaluasi Kinerja Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI/BKK/BKK)
    - 562.33 Pencabutan Ijin Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI, BKK, BKS)
- 563 Latihan Kerja
  - 563.1 Pendidikan Pekerja
    - 563.11 Pendidikan dan Latihan Kerja
    - 563.12 Diklat Dalam Negeri (PKL, Prakerin, OJT)
    - 563.13 Diklat Luar Negeri (Pemagangan)
  - 563.2 Sarana dan Prasarana Latihan Kerja
    - 563.21 Tempat Pelatihan (BLK)
    - 563.22 Instruksi/Pelatih
    - 563.23 Modul/Silabus dan Bahan Praktik
    - 563.24 Kurikulum dan Metode Pengajaran
    - 563.25 Sertifikat
  - 563.3 Kerjasama Pelatihan Tenaga Kerja
- 564 Tenaga Sukarela
  - 564.1 Butsi
  - 564.2 Padat Karja
- 565 Perselisihan Pekerja
  - 565.1 Perselisihan dan Perkara Hukum Naker
    - 565.11 Pengaduan Perkara Pekerja/NAKER
    - 565.12 Pemeriksaan Perkara Pekerja/NAKER

- 565.13 Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pekerja/NAKER
- 565.14 Sidang Perkara Perselisihan Pekerja/NAKER
- 565.15 Hasil Putusan Sidang Perkara Perselisihan Pekerja (NAKER)
  
- 565.16 Peninjauan Kembali Hasil Putusan Sidang KP2K (PAD/P4P)
  
- 565.17 Permintaan Eksekusi terhadap Hasil Keputusan KP2K
- 565.18 Daftar Usulan, Susunan dan Penetapan Anggota KP2K
  
- 565.2 Pemogokan/Unjuk Rasa Tenaga Kerja
  
- 566.1 Instansi Proteksi Kebakaran
- 566.2 Pemakaian Alat Keselamatan Kerja
- 566.3 Keterangan Kelayakan atau Pelindung Diri (APD) dalam Bekerja
- 566.4 Pengangkatan dan Pembinaan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
- 566.5 Pelatihan/Pembinaan Hyperkes dan Keselamatan Kerja
- 566.6 Pengujian dan Hasil Pemeriksaan Hyperkes
- 566.7 Gangguan Lingkungan Tempat Usaha
  
- 566.8 Perlengkapan Sarana Kerja
- 556.81 Pemasangan dan Pemakaian Lift (Pesawat Angkat/Angkut)
  
- 556.82 Pemasangan dan Pemakaian Pesawat Uap (Ketel Uap)
  
- 556.83 Pemasangan dan Pemakaian Motor Diesel
- 556.84 Pemasangan dan Pemakaian Tanki tak Bertekanan
- 556.85 Pemasangan dan Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran
  
- 566.9 Ijin Tenaga Kerja Wanita Masuk Malam Hari (Sip Malam)
  
- 567 Pemutusan Hubungan Kerja
- 567.1 Pengaduan PHK Sepihak
- 567.2 PHK Masal
- 567.3 Bantuan Hukum bagi Pekerja yang di PHK
- 567.4 Ijin Melakukan PHK
- 567.5 Perhitungan Masa Kerja bagi Pekerja yang di PHK
- 567.6 Pemberian Uang Tunggu bagi Pekerja yang di PHK
- 567.7 Pemberian Uang Pesangon bagi Pekerja yang di PHK

- 568 Kesejahteraan Pekerja
  - 568.1 Bantuan Kredit/Bantuan Modal Kerja bagi Naker
    - 568.11 Pemilihan Pekerja Teladan
  - 568.2 Perumahan Pekerja
  - 568.3 Keikutsertaan Pekerja dalam Program Jamsostek
  - 568.4 Koperasi Pekerja
  - 568.5 Sarana Transportasi Pekerja
  - 568.6 Perpustakaan Pekerja
  - 568.7 Tempat Ibadah Pekerja
  - 568.8 Rekreasi dan Olah Raga Pekerja
- 568.9 Pendirian, Pendaftaran, dan Kegiatan Organisasi Pekerja
  - 568.91 Lembaga Kerjasama Bipartid
- 569 Tenaga Kerja Orang Asing
  - 569.1 Rekomendasi Perpanjangan Ijin Kerja Tenaga Asing (IKTA)
  - 569.2 Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPKTA)
  - 569.3 Kualifikasi Keahlian Tenaga Kerja Asing
  - 569.4 Perjanjian Kerja dengan Negara Asing
  - 569.5 Data Tenaga Kerja Asing
  - 569.6 Kecelakaan/Kematian Tenaga Kerja Asing
  - 569.7 Pemulangan Tenaga Kerja Asing
  - 569.8 Pemberdayaan dan Kontribusi Tenaga Kerja Asing
  - 569.9 Tenaga Kerja Asing Ilegal
- 570 PENANAMAN MODAL**
  - 570.1 Penanaman Modal Dalam Negeri
  - 570.2 Penanaman Modal Asing
- 571 Modal Patungan (Joint Venture/Penyertaan Modal)
- 572 Pasar Uang dan Modal
- 573 Saham
- 580 PERBANKAN MONETER**
  - 581 Kredit
  - 582 Investasi
- 583 Tabungan
  - 583.1 Deposito

- 583.2 Tabanas
- 583.3 Taska
- 583.4 Tapelpram
  
- 584 Bank Pembangunan Daerah
- 584.1 Bank Jateng
- 584.2 BKK, BPR BKK, Bank Pasar
  
- 585 Asuransi
- 585.1 Dana Kecelakaan Lalu Lintas
- 585.2 Polis
- 585.3 Premi
- 585.4 Tertanggung/Pemegang Polis
- 585.5 Uang Pertanggungan
  
- 586 Alat Pembayaran meliputi Check, Giro Wesel, Transfer
- 587 Fiskal
- 588 Hutang Negara Obligasi
- 589 Moneter

**590 AGRARIA**

- 591 Tata Guna Tanah
- 591.1 Pemetaan dan Pengukuran
- 591.2 Perpetaan
- 591.3 Penyediaan Data, Peta dan Publikasi
- 591.4 Fakta Tata Guna Tanah
- 591.5 Tanah Kritis
  
- 592 Landreform
- 592.1 Redistribusi
- 592.11 Pendaftaran Pemilik dan Pengurus Tanah Pertanian
- 592.12 Penentuan Tanah Obyek Landreform
- 592.13 Pembagian Tanah Landreform
- 592.14 Sengketa Redistribusi Tanah Obyek Landreform
  
- 592.2 Ganti Rugi

- 592.21 Ganti Rugi Tanah Kelebihan
- 592.22 Sengketa Ganti Rugi Tanah Kelebihan
- 592.23 Ganti Rugi Tanah Absentee
- 592.24 Sengketa Ganti Rugi Tanah Absentee
- 592.25 Ganti Rugi Tanah Patikelir
- 592.26 Sengketa Ganti Rugi Tanah Partikelir
  
- 592.3 Bagi Hasil
  - 592.31 Penetapan Imbangan bagi Hasil
  - 592.32 Pelaksanaan Perjanjian bagi Hasil
  - 592.33 Sengketa Perjanjian bagi Hasil
- 592.4 Gadai Tanah
  - 592.41 Pendaftaran Pelaksanaan Gadai Tanah
  - 592.42 Pelaksanaan Gadai Tanah
  - 592.43 Sengketa Gadai Tanah
  
- 592.5 Bimbingan dan Penyuluhan
- 592.6 Pengembangan
- 592.7 Yayasan Dana Landreform (YDL)
  
- 593 Pengurusan Hak-Hak Tanah
  - 593.1 Perorangan
    - 593.11 Warga Negara Indonesia
    - 593.12 Sewa Tanah untuk Tanaman tertentu: Tebu, Tembakau, Rosela, Cochorus
  
  - 593.2 Hak Milik
    - 593.21 Perorangan
    - 593.22 Badan Hukum
  
  - 593.3 Hak Pakai
    - 593.31 Perorangan
      - 593.311 Warga Negara Indonesia
      - 593.312 Warga Negara Asing
  
    - 593.32 Badan Hukum
      - 593.321 Badan Hukum Indonesia
      - 593.322 Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat, Kantor Dagang Asing
  
  - 593.33 Tanah Gedung-Gedung Negeri

- 593.4 Guna Usaha
  - 593.41 Perkebunan Besar
  - 593.42 Perkebunan Rakyat
  - 593.43 Peternakan
  - 593.44 Perikanan
  - 593.45 Kehutanan
  
- 593.5 Hak Guna Bangunan
  - 593.51 Perorangan
  - 593.52 Badan Hukum
  - 593.53 P3MB (Panitia Pelaksanaan Pengusaha Milik Belanda)
  - 593.54 Badan Hukum Asing Belanda-BPK No. 5/56
  - 593.55 Pemulihan Hak (Pen. Pres 4/1960)
  
- 593.6 Hak Pengelolaan
  - 593.61 PN Perumnas, Bonded Ware House, Industrial Estate, Real
  - 593.62 Perusahaan daerah Pembangunan Perumahan
  
- 593.7 Sengketa Tanah
  - 593.71 Peradilan Perkara Tanah (lihat juga 183)
  
- 593.8 Pencabutan dan Pembebasan Tanah
  - 593.81 Pencabutan Hak
  - 593.82 Pembebasan Tanah
  - 593.83 Ganti Rugi Tanah
  
- 594 Pendaftaran Tanah
  - 594.1 Pengukuran/Pemetaan
    - 594.11 Fotogrametri
    - 594.12 Terrestis
    - 594.13 Triangulasi
    - 594.14 Peralatan
  - 594.2 Dana Pengukuran (Permen Angraria No. 6/1960)
  - 594.3 Sertifikat
  - 594.4 Pejabat Pembuat Akta Tanah
  
- 595 Transmigrasi
  - 595.1 Tata Guna Tanah
  - 595.2 Landreform

- 595.3 Pengurusan Hak-hak Tanah
- 595.4 Pendaftaran Tanah

**600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN**

- 601 -
- 602 -
- 603 Arsitektur
  
- 604 Bahan Bangunan
  - 604.1 Tanah dan Batu
  - 604.2 Aspal
  
  - 604.3 Besi dan Logam Lainnya
    - 604.31 Besi Beton
    - 604.32 Besi Profil (Konstruksi)
    - 604.33 Paku
    - 604.34 Alumunium Profil
  
  - 604.4 Bahan-bahan Perlindungan dan Pengawet (Cat, Tech Oil, Pengawet Kayu)
  - 604.5 Semen
  - 604.6 Kayu
  - 604.7 Bahan Penutup Atap
  - 604.8 Alat-alat Penggantung dan Pengunci
  - 604.9 Bahan Penutup Dinding/Lantai
  - 604.10 Bahan Cetak (Buis Beton, Paving, Rooster dan lain-lain)
  - 604.11 Bahan Pipa (PVC, Galvanis dan lain-lain)
  - 604.12 Bahan Langit-Langit (Eternit, Gypsum, Plywood dan lain-lain)
  
  - 604.13 Bahan Kaca
  - 604.14 Bahan Sanitair
  - 604.15 Pintur Air
  - 604.16 Bahan-bahan Bangunan Lainnya
  
- 605 Instalasi
  - 605.1 Instalasi Bangunan
  - 605.2 Instalasi Listrik
  - 605.3 Instalasi Air/Sanitasi
  - 605.4 Instalasi Pengatur Udara
  - 605.5 Instalasi Akuistik



605.6 Instalasi Cahaya/Penerangan

606 Konstruksi Pencegahan

606.1 Konstruksi Pencegahan terhadap Kebakaran

606.2 Konstruksi Pencegahan terhadap Gempa

606.3 Konstruksi Pencegahan terhadap Angin/Udara/Panas

606.4 Konstruksi Pencegahan terhadap Kegaduhan

606.5 Konstruksi Pencegahan terhadap Gas/Explosive

606.6 Konstruksi Pencegahan terhadap Serangga

606.7 Konstruksi Pencegahan terhadap Radiasi Atom

**610 PENGAIRAN**

611 Irigasi

611.1 Bangunan Waduk

611.11 Bendungan

611.12 Tanggul

611.13 Pelimpahan Banjir

611.14 Menara Pengambilan

611.15 Pembangunan Dermaga

611.2 Bangunan Pengambilan

611.21 Bendungan

611.211 Bendungan dengan Pintu Bilas

611.212 Bendungan dengan Pompa

611.22 Pengambilan Bebas/Free Intake

611.23 Pengambilan Bebas dengan Pompa

611.24 Sumur dengan Pompa

611.25 Kantung Lumpur

611.26 Silf Ekstretor

611.27 Escope Chenel

611.3 Bangunan Pembawa

611.31 Saluran

611.311 Saluran Induk/Primer

611.312 Saluran Sekunder

611.313 Suplesi

611.314 Tersier

611.315 Saluran Kwarter  
611.316 Saluran Pasangan  
611.317 Saluran Tertutup/Terowongan

611.32 Bangunan  
611.321 Bangunan Bagi  
611.322 Bangunan Bagi Sadap  
611.323 Bangunan Sadap  
611.324 Bangunan Check  
611.325 Bangunan Terjun  
611.326 Corongan  
611.327 Affover

611.33 Box Tersier  
611.34 Got Miring  
611.35 Talang  
611.36 Syphon  
611.37 Gorong-gorong  
611.38 Pelimpahan Samping

611.4 Bangunan Pembuangan  
611.41 Saluran  
611.411 Saluran Pembuangan Induk  
611.412 Saluran Pembuangan Sekunder  
611.413 Saluran Pembuangan Tersier

611.42 Bangunan  
611.421 Bangunan Outlet  
611.422 Bangunan Sekunder  
611.423 Bangunan Penahan Banjir

611.43 Gorong-gorong Pembuangan  
611.44 Talang Pembuangan  
611.45 Syphon Pembuangan

611.5 Bangunan Lainnya  
611.51 Jalan

- 611.511 Jalan Inspeksi
- 611.512 Jalan Logistik
  
- 611.52 Jembatan
  - 611.521 Jembatan Inspeksi
  - 611.522 Jembatan Hewan
  
- 611.53 Tangga Cuci
- 611.54 Kubangan Kerbau
- 611.55 Waduk Lapangan
- 611.56 Bangunan Penunjang
- 611.57 Jaringan Telepon
- 611.58 Stasiun Argo
- 611.59 Bangunan TPI dan Pasar Ikan
  
- 612 Polder
  - 612.1 Tanggul Keliling
    - 612.11 Tanggul
    - 612.12 Bangunan Penutup Sungai
    - 612.13 Jembatan
  
  - 612.2 Bangunan Pembawa
    - 612.21 Saluran
      - 612.211 Saluran Muka
      - 612.212 Saluran Pembawa Induk
      - 612.213 Saluran Pembawa Sekunder
      - 612.214 Saluran Stasiun Pompa Pemasukan
  
    - 612.22 Bangunan bagi:
      - 612.221 Gorong-gorong
      - 612.222 Syphon
  
- 612.3 Bangunan Pembuangan
  - 612.31 Stasiun Pompa Pembuangan
  
  - 612.32 Saluran
    - 612.321 Saluran Pembawa Induk
    - 612.322 Saluran Pembawa Sekunder

- 612.33 Pintu Air Pembuangan
- 612.34 Gorong-gorong Pembuangan
- 612.35 Syphon Pembuangan
  
- 612.4 Bangunan Lainnya
- 612.41 Bangunan
  - 612.411 Bangunan Pengukur Debit Air
  - 612.412 Bangunan Pengukur Curah Hujan
  - 612.413 Bangunan Gudang Stasiun Pompa
  - 612.414 Bangunan Listrik Stasiun Pompa
  
- 612.42 Rumah Petugas Eksploitasi
  
- 613 Pasang Surut
  - 613.1 Bangunan Pembawa
    - 613.11 Saluran Pembawa Induk
    - 613.12 Saluran Pembawa Sekunder
    - 613.13 Saluran Pembawa Tersier
    - 613.14 Saluran Penyimpanan Air
    - 613.15 Saluran Pintu Pembuangan
  
  - 613.2 Bangunan Pembuangan
    - 613.21 Saluran Pembawa Induk
    - 613.22 Saluran Pembawa Sekunder
    - 613.23 Saluran Pembawa Tersier
    - 613.24 Saluran Penyimpanan Air
    - 613.25 Saluran Pintu Pembuangan
  
  - 613.3 Bangunan Lainnya
    - 613.31 Kolom Pasang
    - 613.34 Jalan
    - 613.35 Jembatan
  
- 614 Pengendalian Sungai
  - 614.1 Bangunan Pengaman
    - 614.11 Tanggul Banjir
    - 614.12 Pintu Pengatur Banjir
    - 614.13 Klep Pengatur Banjir
    - 614.14 Tembok Pengaman Talut
    - 614.15 Krib
    - 614.16 Kantung Lumpur

- 614.17 Check Dam
- 614.18 Syphon
  
- 614.2 Saluran Pengaman
- 614.21 Saluran Banjir
- 614.22 Saluran Drainase
- 614.23 Corepure
  
- 614.3 Bangunan Lainnya
- 614.31 Warning System
  
- 614.32 Stasiun
- 614.321 Stasiun Pengukur Curah Hujan
- 614.322 Stasiun Pengukur Air
- 614.323 Stasiun Pengukur Cuaca
- 614.324 Stasiun Pos Penjagaan
  
- 615 Pengamanan Pantai
- 615.1 Tanggul
- 615.2 Krib
- 615.3 Bangunan Lainnya
  
- 616 Air Permukaan (Danau, Waduk, Sungai)
- 616.1 Stasiun Pompa
- 616.2 Bangunan Pembawa
- 616.3 Bangunan Pembuangan
- 616.4 Bangunan Lainnya
  
- 620 JALAN**
- 621 Jalan Kota/Kabupaten
- 621.1 Daerah Penguasaan
- 621.11 Tanah
- 621.12 Tanaman
- 621.13 Bangunan
- 621.2 Bangunan Sementara
- 621.21 Jalan Sementara
- 621.22 Kantor Proyek
- 621.23 Gedung Proyek
- 621.24 Barak Kerja
- 621.25 Laboratorium Lapangan
- 621.26 Rumah

- 621.3 Badan Jalan
- 621.31 Pekerjaan Tanah (Earth Work)
- 621.32 Stabilisasi
  
- 621.4 Perkerasan
- 621.41 Lapisan Pondasi Bawah
- 621.42 Lapisan Pondasi
- 621.43 Lapisan Permukaan
  
  
- 621.5 Drainase
- 621.51 Parit Tanah
- 621.52 Gorong-gorong (Culvert)
  
- 621.6 Buku Trotoir
- 621.61 Tanah
- 621.62 Perkerasan
- 621.63 Pasangan
  
- 621.7 Medium
- 621.71 Tanah
- 621.72 Tanaman
- 621.73 Perkerasan
- 621.74 Pasangan
  
- 621.8 Daerah Sampingan
- 621.81 Tanaman
- 621.82 Pagar
  
- 621.9 Bangunan Pelengkap dan Pengaman
- 621.91 Rambu-rambu/Tanda-tanda Lalu Lintas
- 621.92 Lampu Penerangan
- 621.93 Lampu Pengatur Lalu Lintas
- 621.94 Patok-patok KM
- 621.95 Patok-patok R.O.W. (Sempadan)
- 621.96 Rel Pengamanan
- 621.97 Pagar
- 621.98 Turap Penahan

- 621.99 Bronjong
  
- 622 Jalan Provinsi
  - 622.1 Daerah Penguasaan
    - 622.11 Tanah
    - 622.12 Tanaman
    - 622.13 Bangunan
    - 622.14 Jalan Sementara
    - 622.15 Jembatan Sementara
    - 622.16 Kantor/Gedung Proyek
    - 622.17 Barak Kerja
    - 622.18 Laboratorium Lapangan
    - 622.19 Rumah
  - 622.2 Badan Jalan
    - 622.21 Pekerjaan Tanah (Earth Work)
    - 622.22 Stabilisasi
  - 622.3 Perkerasan (Pavement)
    - 622.31 Lapis Pondasi Bawah
    - 622.32 Lapis Pondasi
    - 622.33 Lapis Permukaan
  - 622.4 Drainage
    - 622.41 Parit
    - 622.42 Gorong-gorong (Culvert)
    - 622.43 Buku Trotoir
    - 622.44 Tanah
    - 622.45 Perkerasan
  - 622.5 Trotoir
    - 622.51 Tanah
    - 622.52 Perkerasan
  - 622.6 Medium
    - 622.61 Tanah
    - 622.62 Tanaman
    - 622.63 Perkerasan
    - 622.64 Pasangan
  - 622.7 Daerah Samping

622.71 Tanaman  
622.72 Pagar

622.8 Bangunan Perlengkapan dan Pengamanan  
622.81 Rambu-rambu  
622.82 Lampu Penerangan  
622.83 Lampu Pengatur Lalu Lintas  
622.84 Patok-patok KM  
622.85 Patok-patok R.O.W. (Sempadan)  
622.86 Rel Pengamanan  
622.87 Pagar  
622.88 Turap Penahan  
622.89 Bronjong

623 Jalan Nasional  
623.1 Daerah Penguasaan  
623.2 Badan Jalan  
623.3 Perkerasan (Lapis Pondasi, Lapis Permukaan)  
623.4 Drainase (Gorong-gorong, Parit)  
623.5 Median  
623.6 Daerah Samping (Pagar, Tanaman)  
623.7 Bangunan Pelengkap dan Pengamanan (Rambu-rambu)

**630 JEMBATAN**

631 Jembatan pada Jalan Kota/Kabupaten  
631.1 Daerah Penguasaan  
631.11 Tanah  
631.12 Tanaman  
631.13 Bangunan

631.2 Bangunan Sementara  
631.21 Jalan Sementara  
631.22 Jembatan Sementara  
631.23 Kantor Proyek  
631.24 Gedung Proyek  
631.25 Barak Kerja  
631.26 Laboratorium Lapangan  
631.27 Rumah



- 631.3 Pekerjaan Tanah (Earth Work)
- 631.31 Galian Tanah
- 631.32 Timbunan Tanah
  
- 631.4 Pondasi
- 631.41 Pondasi Kepala Jembatan
- 631.42 Pondasi Pilar
- 631.43 Pondasi Angker
  
- 631.5 Bangunan Bawah
- 631.51 Kepala Jembatan
- 631.52 Pilar
- 631.53 Piloon
- 631.54 Landasan
  
- 631.6 Bangunan
- 631.61 Gelagar
- 631.62 Lantai
- 631.63 Perkerasan
- 631.64 Jalan Orang/Trotoir
- 631.65 Sandaran
- 631.66 Talang Air
  
- 631.7 Bangunan Pengaman
- 631.71 Turap Penahan
- 631.72 Bronjong
- 631.73 Strek Dam
- 631.74 Kist Dam
- 631.75 Coupute
- 631.76 Krip
  
- 631.8 Bangunan Pelengkap
- 631.81 Rambu-rambu/Tanda-tanda Lalu Lintas
- 631.82 Patok Pengamanan
- 631.83 Patok R.O.W. (Sempadan)
  
- 631.9 Oprit
- 631.91 Badan
- 631.92 Perkerasan
- 631.93 Drainage

- 631.94 Baku
- 631.95 Medium
- 632 Jembatan pada Jalan Provinsi
- 632.1 Daerah Penguasaan
- 632.11 Tanah
- 632.12 TAnaman
- 632.13 Bangunan
  
- 632.2 Bangunan Sementara
- 632.21 Jalan Sementara
- 632.22 Jembatan Sementara
- 632.23 Kantor Proyek
- 632.24 Gedung Proyek
- 632.25 Barak Kerja
- 632.26 Laboratorium Lapangan
- 632.27 Rumah
  
- 632.3 Pekerjaan Tanah (Earth Work)
- 632.31 Galian Tanah
- 632.32 Timbunan Tanah
  
- 632.4 Pondasi
- 632.41 Pondasi Kepala Jembatan
- 632.42 Pondasi Pilar
- 632.43 Pondasi Angker
  
- 632.5 Bangunan Bawah
- 632.51 Kepala Jembatan
- 632.52 Pilar
- 632.53 Piloon
- 632.54 Landasan
  
- 632.6 Bangunan
- 632.61 Gelagar
- 632.62 Lantai
- 632.63 Perkerasan
- 632.64 Jalan Orang/Trotoir
- 632.65 Sandaran
- 632.66 Talang Air
  
- 632.7 Bangunan Pengaman

- 632.71 Turap Penahan
- 632.72 Bronjong
- 632.73 Strek Dam
- 632.74 Kist Dam
- 632.75 Coupute
- 632.76 Krip
  
- 632.8 Bangunan Pelengkap
- 632.81 Rambu-rambu/Tanda-tanda Lalu Lintas
- 632.82 Patok Pengamanan
- 632.83 Patok R.O.W. (Sempadan)
  
- 632.9 Oprit
- 632.91 Badan
- 632.92 Perkerasan
- 632.93 Drainage
- 632.94 Baku
- 632.95 Medium
  
- 633 Jembatan pada Jalan Nasional
- 633.1 Daerah Penguasaan (Tanah, Tanaman, Bangunan)
- 633.2 Bangunan Sementara (Gudang Proyek, Kantor Proyek)
- 633.3 Pondasi
- 633.4 Bangunan Bawah
- 633.5 Bangunan (Gelagar, Lantai, Sandaran, Perkerasan)
- 633.6 Bangunan Pengamanan (Bronjong Strek Dam, Krib)
- 633.7 Bangunan Pelengkap dan Pengaman (Rambu-rambu)
  
- 640 BANGUNAN**
- 641 Bangunan Pemerintah
- 641.1 Gedung Pengadilan
- 641.2 Rumah Pejabat Negara
- 641.3 Gedung DPR
- 641.4 Gedung Balai Kota
- 641.5 Penjara
- 641.6 Perkantoran
  
- 642 Bangunan Pendidikan
- 642.1 Taman Kanak-Kanak
- 642.2 SD dan Sekolah Menengah
- 642.3 Perguruan Tinggi

- 643      Bangunan Rekreasi
  - 643.1    Bangunan Olah Raga
  - 643.2    Gedung Kesenian
  - 643.3    Gedung Pemancar
  - 643.4    Bangunan Perhotelan
  
- 644      Bangunan Perdagangan
  - 644.1    Pusat Perbelanjaan
  - 644.2    Gedung Perdagangan
  - 644.3    Bank
  - 644.4    Perkantoran
  - 644.5    Bangunan Gudang/Penyimpanan
  
- 645      Bangunan Pelayanan Umum
  - 645.1    Mandi Cuci Kakus (MCK) Umum
  - 645.2    Gedung Parkir
  - 645.3    Rumah Sakit
  - 645.4    Gedung Telkom
  - 645.5    Terminal Angkutan Umum
  - 645.6    Terminal Angkutan Air
  
  - 645.7    Terminal Angkutan Darat
  - 645.8    Bangunan Keagamaan
  
- 646      Bangunan Peninggalan Sejarah
  - 646.1    Monumen
  - 646.2    Candi
  - 646.3    Kraton
  - 646.4    Rumah Tradisional
  
- 647      Bangunan Industri
  
- 648      Bangunan Tempat Tinggal
  - 648.1    Rumah Perkantoran
    - 648.11   Inti/Sederhana
    - 648.12   Sedang/Mewah
  
  - 648.2    Rumah Pedesaan
    - 648.21   Rumah Contoh
  
  - 648.3    Real Estate

- 649 Elemen Bangunan
  - 649.1 Pondasi
    - 649.11 Di atas Tiang
  - 649.2 Dinding
    - 649.21 Penahan Beban
    - 649.22 Tidak Menahan Beban
  - 649.3 Atap
  - 649.4 Lantai/Langit-langit
    - 649.41 Suspendend
    - 649.42 Solit
  - 649.5 Pintu/Jendela
    - 649.51 Pintu Hermonik
    - 649.52 Pintu Biasa
    - 649.53 Pintu Sorong
    - 649.54 Jendela Kayu
    - 649.55 Jendela Sorong
    - 649.56 Jendela Vertikal

**650 TATA RUANG**

- 651 Daerah Perdagangan/Pelabuhan
  - 651.1 Daerah Pusat Perbelanjaan
  - 651.2 Daerah Perkantoran
- 652 Daerah Pemerintahan
- 653 Daerah Perumahan (Site & Servei)
  - 653.1 Kepadatan Rendah (Low Density)
  - 653.2 Kepadatan Tinggi (High Density)
  - 653.3 Kepadatan Sedang (Medium Density)
  - 653.4 IMB
    - 653.41 Hunian
    - 653.42 Keagamaan
    - 653.43 Usaha
    - 653.44 Sosial Budaya

- 653.45 Khusus
- 653.46 Campuran
- 653.47 Tower/Menara Telekomunikasi
- 653.48 Reklame
  
- 654 Daerah Industri
  - 654.1 Industri Berat
  - 654.2 Industri Ringan
  - 654.3 Industri Rumah (Home Industry)
  
- 655 Daerah Rekreasi (Open Spece)
  - 655.1 Public Garden
  - 655.2 Sport & Playing Fields
  - 655.3 Open Space
  
- 656 Transportasi (Tataletak)
  - 656.1 Jaringan Jalan
    - 656.11 Penerangan Jalan
  - 656.2 Jaringan Kereta Api
  - 656.3 Jaringan Sungai
  
- 657 Assineering
  - 657.1 Saluran Pengumpulan
    - 657.2 Instalasi Pengolahan
      - 657.21 Bangunan
      - 657.22 Bangunan Penyaring
      - 657.23 Bangunan Penghancur Kotoran
      - 657.24 Bangunan Pengendapan
      - 657.25 Bangunan Pengering Lumpur
      - 657.26 Unit Disinfektan
      - 657.27 Unit Perpompaan
      - 657.28 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
  
- 658 Kesehatan Lingkungan
  - 658.1 Persampahan
    - 658.11 Bangunan Pengumpulan
    - 658.12 Bangunan Pemusnahan

658.2 Pengotoran Udara

658.3 Pengotoran Air

658.31 Air Buangan Industri

658.4 Kegaduhan

658.5 Kebersihan Kota

**660 TATA LINGKUNGAN**

660.1 Lingkungan Hidup

660.2 Kebersihan Lingkungan

660.3 Pencemaran

660.31 Pencemaran Air

660.32 Pencemaran Udara

660.33 Pencemaran Tanah

660.34 Pencemaran Limbah Padat dan Bahan Berbahaya Beracun  
(B3)

661 Kerusakan Lingkungan

661.1 Konservasi Pesisir dan Laut

661.2 Konservasi Sumber Daya Alam

662 Pentaatan Hukum Lingkungan

663 Laboratorium Lingkungan

663.1 Air

663.2 Udara

663.3 Tanah

664 Analisis Dampak Lingkungan

665 Pengembangan Teknologi Lingkungan

666 Pengembangan Kapasitas

667 Pengamanan Lingkungan

**670 KETENAGAAN**

670.1 Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD)

671 Listrik

671.1 Kelistrikan

671.11 Perijinan

- 671.12 Rekomendasi
- 671.13 Pembinaan dan Pengawasan
- 671.14 Kelistrikan PLN
- 671.15 Kelistrikan Non PLN
  
- 671.2 Pembangkit Tenaga Listrik
  - 671.21 Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
  - 671.22 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD)
  
  - 671.23 Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
  - 671.24 Pembangkit Listrik Tenaga Matahari (PLTM)
  - 671.25 Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)
  - 671.26 Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB)
  - 671.27 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
  
- 671.3 Transmisi Tenaga Listrik
  - 671.31 Gardu Induk/Gardu Penghubung/Gardu Trafo
  - 671.32 Saluran Udara Tenaga Listrik
  - 671.33 Kabel Bawah Tanah
  
- 671.4 Distribusi Tenaga Listrik
  - 671.41 Gardu Distribusi
  - 671.42 Tegangan Menengah
  - 671.43 Tegangan Rendah
  - 671.44 Jaringan Bawah Tanah
  
- 671.5 Pengusahaan Listrik
  - 671.51 Sambungan Listrik
  - 671.52 Penjualan Tenaga Listrik
  - 671.53 Tarif Listrik
  
- 672 Tenaga Air
- 673 Tenaga Minyak
- 674 Tenaga Gas
- 675 Tenaga Matahari
- 676 Tenaga Nuklir
- 677 Tenaga Panas Bumi
- 678 Tenaga Uap
- 679 Tenaga Lainnya



**680 PERALATAN PEKERJAAN UMUM**

**690 AIR MINUM**

- 691 Intake
  - 691.1 Broncaptering/Bak Penangkap Mata Air
  - 691.2 Sumur
  - 691.3 Bendungan
  - 691.4 Saringan (Screen)
  - 691.5 Pintu Air
  - 691.6 Saluran Pembawa
  - 691.7 Alat Ukur
  - 691.8 Perpompaan
  
- 692 Transmisi Air Baku
  - 692.1 Perpipaian
  - 692.2 Katup Udara (Air Rolief)
  - 692.3 Tutup Penguras (Blow off)
  - 692.4 Bak Pelepas Tekanan
  - 692.5 Jembatan Pipa
  - 692.6 Syphon
  
- 693 Instalasi Pengelolaan
  - 693.1 Bangunan Ukur
  - 693.2 Bangunan Aerasi
  - 693.3 Bangunan Pengendapan
  - 693.4 Bangunan Pembubuh Bahan Kimia
  - 693.5 Bangunan Pengaduk
  - 693.6 Bangunan Saringan
  - 693.7 Perpompaan
  - 693.8 Clear Hell
  
- 694 Distribusi
  - 694.1 Reservoir Menara Bawah Tanah
    - 694.11 Menara
    - 694.12 Reservoir Menara Bawah Tanah
  - 694.2 Perpipaian
  - 694.3 Perpompaan
  - 694.4 Jembatan Pipa
  - 694.5 Syphon

- 694.6 Hydran
- 694.61 Hydran Umum
- 694.62 Hydran Kebakaran
  
- 694.7 Katup
- 694.71 Katup Udara (Air Rolief)
- 694.72 Katup Pelepas (Blow off)
  
- 694.8 Bak Pelepas Tekanan (Pressuer Reducing Valve)

**700 PENGAWASAN**

- 700.1 Kebijakan dan Program Pengawasan
- 700.2 Pengawasan Perencanaan Pengadaan/Proyek
  
- 701 Pengawasan Inventarisasi Asset
- 702 Pengawasan Organisasi dan Tata Laksana
- 703 Pengawasan Perpustakaan dan Dokumen
- 704 Pengawasan Penelitian/Riset
- 705 Pengawasan Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Teknologi
- 706 Pengawasan Pertanahan/BPN

**710 BIDANG PEMERINTAHAN**

- 711 Pengawasan Pemerintahan Provinsi
- 712 Pengawasan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 713 Pengawasan Pemerintahan Desa

**720 BIDANG POLITIK**

- 721 Pengawasan Partai termasuk Pendanaan Partai, Atribut Partai dan lain-lain
- 722 Pengawasan Pembinaan Ipoleksosbudhankam
- 723 Pengawasan Organisasi meliputi Organisasi Kemasyarakatan, Profesi, Wanita, Buruh/Tani dan Kepemudaan
  
- 724 Pengawasan terhadap Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa

**730 BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN**

- 731 Pengawasan Kesbangpolinmas
- 732 Pengawasan Pelaksanaan Penanggulangan Bencana Alam/SAR

**740 BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**

- 741 Pengawasan Pembangunan Desa
- 742 Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan
- 743 Pengawasan Kebudayaan
- 744 Pengawasan Kesehatan/Makanan/Obat
- 745 Pengawasan SARA (Suku Agama Ras)
- 746 Pengawasan Kesejahteraan Sosial
- 747 Pengawasan Kependudukan Migrasi/Urbanisasi
- 748 Pengawasan Kehumasan, Media Massa dan Penyiaran
- 749 Pengawasan Bantuan/Subsidi Masyarakat

**750 BIDANG PEREKONOMIAN**

- 751 Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian
- 752 Pengawasan Pertanian dan Perkebunan
- 753 Pengawasan Kehutanan
- 754 Pengawasan Pertambangan/ESDM
- 755 Pengawasan Peternakan dan Kesehatan Hewan
- 756 Pengawasan Tenaga Kerja dan Ketransmigrasian
- 757 Pengawasan PMDN/PMA
- 758 Pengawasan Perbankan/Moneter
- 759 Pengawasan Kelautan dan Perikanan

**760 BIDANG PEKERJAAN UMUM**

- 761 Pengawasan Pengairan
- 762 Pengawasan Jalan
- 763 Pengawasan Jembatan
- 764 Pengawasan Bangunan
- 765 Pengawasan Tata Ruang Kota
- 766 Pengawasan Tata Lingkungan
- 767 Pengawasan Ketenagaan
- 768 Pengawasan Air Minum

**770 PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK**

- 771 Penyimpangan Pejabat Publik

**780 BIDANG KEPEGAWAIAN**

- 781 Pengawasan Pengadaan PNS
- 782 Pengawasan Penilaian dan Disiplin PNS
- 783 Keanggotaan PNS dalam Parpol
- 784 Penyimpangan Pejabat/PNS
- 785 Persengketaan PNS

**790 BIDANG KEUANGAN**

- 791 Pengawasan Anggaran
- 792 Pengawasan Akuntansi
- 793 Pengawasan Perbendaharaan
- 794 Pengawasan Pengelolaan Kas Daerah
- 795 Pengawasan Pendapatan
- 796 Pengawasan Asset

**800 KEPEGAWAIAN**

- Termasuk klasifikasi di sini: Kebijakan Kepegawaian
- 800.1 Perencanaan
  - 800.2 Penelitian
  - 800.3 Statistik

**810 PENGADAAN**

- meliputi Pengumuman Pendaftaran Penerimaan Pegawai, Lamaran, Seleksi Administrasi, Pengujian Kesehatan dan Pengangkatan Calon Pegawai
- 811 Pendaftaran CPNS
    - 811.1 Testing
    - 811.2 Screening
    - 811.3 Pengumuman Tes dan Pemanggilan Calon yang Diterima menjadi CPNS
  - 812 Pengujian Kesehatan
  - 813 Pengangkatan CPNS
    - 813.1 Pengangkatan CPNS Golongan I
    - 813.2 Pengangkatan CPNS Golongan II
    - 813.3 Pengangkatan CPNS Golongan III

**820 MUTASI**

- 821 Pengangkatan
  - 821.1 Pengangkatan CPNS menjadi PNS

- 821.11 Pengangkatan menjadi PNS Golongan I
- 821.12 Pengangkatan menjadi PNS Golongan II
- 821.13 Pengangkatan menjadi PNS Golongan III
  
- 821.2 Pengangkatan dalam Jabatan Struktural, Pembebasan dari Jabatan, Berita Acara Serah Terima Jabatan, Pernyataan Menduduki Jabatan, Sumpah Janji
  - 821.21 Eselon 1
  - 821.22 Eselon 2
  - 821.23 Eselon 3
  - 821.24 Eselon 4
  
- 821.3 Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional, Pemberhentian Sementara, Pengangkatan Kembali, Pernyataan Menduduki Jabatan, Sumpah Janji
  
- 822 Kenaikan Gaji Berkala
  - 822.1 PNS Golongan I
  - 822.2 PNS Golongan II
  - 822.3 PNS Golongan III
  - 822.4 PNS Golongan IV
  
- 823 Kenaikan Pangkat
  - 823.1 PNS Golongan I
  - 823.2 PNS Golongan II
  - 823.3 PNS Golongan III
  - 823.4 PNS Golongan IV
  
- 824 Pemindahan/Pelimpahan/Pembantuan
  - 824.1 PNS Golongan I
  - 824.2 PNS Golongan II
  - 824.3 PNS Golongan III
  - 824.4 PNS Golongan IV
  - 824.5 Lolos Butuh (Mutasi Pegawai dari Instansi Lain)
  - 824.6 Mutasi karena Promosi Jabatan
  - 824.7 Mutasi karena Keluarga
  
- 825 Datasering dan Penempatan Kembali

826 Wajib Militer

**830 KEDUDUKAN**

831 Peninjauan Masa Kerja

832 Penyesuaian Pangkat/Gaji

832.1 PNS Golongan I

832.2 PNS Golongan II

832.3 PNS Golongan III

832.4 PNS Golongan IV

833 Penghargaan Ijazah (Pencantuman Gelar)

834 Penghargaan Lainnya

835 Berkas Baperjakat

**840 KESEJAHTERAAN PEGAWAI**

841 Tunjangan

841.1 Struktural dan Fungsional

841.2 Kehormatan

841.3 Dana Kematian (Uang Duka)

841.4 Tambahan Penghasilan

841.5 Tunjangan Cacat

841.6 Layanan Bantuan Sosial

841.7 Layanan Pakaian Dinas

841.8 Layanan Olah Raga

841.9 Layanan Ekstra Fooding (Instansi tertentu)

842 Dana

842.1 Taspen

842.2 Askes, Bantuan Kesehatan

842.3 Bantuan Pendidikan

843 Perawatan Kesehatan

843.1 Poliklinik, Klinik Konsultasi

843.2 Perawatan Dokter

843.3 Obat-obatan

843.4 Keluarga Berencana

845 Perumahan PNS

846 Dispensasi

**850 CUTI**

851 Cuti Tahunan

852 Cuti Besar

853 Cuti Sakit

854 Cuti Bersalin

855 Cuti karena Alasan Penting

856 Cuti di luar Tanggungan Negara

**860 PENILAIAN**

861 Penghargaan

861.1 Bintang/Satyalencana Karya Satya

861.2 Kenaikan Pangkat Anumerta

861.3 Hadiah berupa Kenaikan Pangkat

861.4 Pegawai Teladan

862 Hukuman

862.1 Ringan

862.2 Sedang

862.3 Berat

863 Konduite/DP3

864 Ujian Dinas

864.1 Tingkat I

864.2 Tingkat II

865 Penilaian Kinerja/SKP

865.1 Struktural

865.2 Fungsional

866 Rehabilitasi

867 Ijin Perceraian (Kode 472.2 terdapat masalah perceraian ???)

**870 TATA USAHA KEPEGAWAIAN**

871 Formasi

- 872 Bezetting/Daftar Urut Kepegawaian
  
- 873 Registrasi, Sistem Informasi Kepegawaian
  - 873.1 NIP
  - 873.2 KARPEG/Kartu Pegawai Elektronik
  - 873.3 Legitimasi/Tanda Pengenal
  - 873.4 Daftar Keluarga
  - 873.5 KARSU/KARIS
  - 873.6 NPWP
  - 873.7 Keanggotaana Organisasi Profesi
  - 873.8 Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai
  - 873.9 LP2P
  - 873.10 LHKPN
  - 873.11 PPKOM, PPTK, Bendahara
  - 873.12 Daftar Riwayat Hidup
  
- 874 Daftar Riwayat Pekerjaan
  - 874.1 Tanggal Lahir
  - 874.2 Penggantian Nama
  
- 875 Kewenangan Mutasi Kepegawaian
  - 875.1 Pelimpahan Wewenang
  - 875.2 Spesimen Tanda Tangan
  
- 876 Korps Kepegawaian
  
- 880 PEMBERHENTIAN**
- 881 atas Permintaan Sendiri termasuk Pengunduran Diri
  
- 882 dengan Hak Pensiun
  - 882.1 Pemberhentian dengan Hak Pensiun PNS Golongan I
  - 882.2 Pemberhentian dengan Hak Pensiun PNS Golongan II
  - 882.3 Pemberhentian dengan Hak Pensiun PNS Golongan III
  - 882.4 Pemberhentian dengan Hak Pensiun PNS Golongan IV
  
- 882.5 Pensiun Janda/Duda
- 882.6 Pensiun Yatim Piatu
- 882.7 Uang Muka Pensiun
  
- 883 karena Meninggal



- 884 Alasan lain, diantaranya keuzuran jasmani
- 885 tidak dengan Hormat
- 886 Pembekalan PNS yang akan Purna Tugas
- 887 Tali Asih Pensiun

**890 PENDIDIKAN PEGAWAI**

- 890.1 Perencanaan Program dan Pelaporan Diklat
  
- 891 Pendidikan Prajabatan
  
- 892 Pendidikan dalam Jabatan
  - 892.1 Diklatpim
  - 892.2 Diklat Teknis
  - 892.3 Diklat Fungsional
  
- 893 Kursus-kursus, Penataran, Bimbingan Teknis
  
- 894 Pengembangan Pegawai
  - 894.1 Tugas Belajar
  - 894.2 Ijin Belajar
  - 894.3 Tunjangan Belajar
  - 894.4 Bantuan Pendidikan
  - 894.5 Penempatan Kembali
  
- 895 Metode
  - 895.1 Kuliah
  - 895.2 Ceramah, Symposium
  - 895.3 Diskusi
  - 895.4 Kuliah Lapangan/OL, Widya Wisata, KKN
  - 895.5 Kurikulum
  - 895.6 Karya Tulis
  
- 896 Tenaga Pengajar, Narasumber
- 897 Administrasi Pendidikan
- 898 Fasilitasi Pendidikan
- 899 Sarana Pendidikan
  
- 900 KEUANGAN**
- 901 Nota Keuangan
- 902 APBN
- 903 APBD

**910        ANGGARAN**

- 911        Keputusan tentang Penunjukan Pengelola Keuangan
- 912        Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Pemimpin, Pejabat Keuangan, dan Pejabat Teknis BLUD
- 913        DPA/DPPA/DPAL-SKPD/PPKD
- 914        Anggaran Kas
- 915        Surat Penyediaan Dana (SPD)
- 916        SILPA

**920        AKUNTANSI**

- 921        Laporan-laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

**930        PERBENDAHARAAN**

- 931        Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- 932        Surat Penolakan Penerbitan SP2D
- 933        Daftar Penguji SP2D

**940        PEMBINAAN KEBENDAHARAAN**

- 941        Bintek-bintek/Kursu yang Berkaitan dengan Keuangan

**950        PENGELOLAAN KAS DAERAH**

- 951        Laporan Pemotongan IWP, Taperum, PPH 21 dari Gaji
- 952        Laporan Rekapitulasi Penerimaan Daerah
- 953        Daftar Pemotongan dan Penyetoran Pajak (PPN/PPh) dari CV/PT/Instansi
- 954        Surat Tanda Setoran (STS)
  
- 955        Laporan Realisasi Daerah
- 955.1     Laporan Realisasi Penerimaan Daerah
- 955.2     Laporan Realisasi Pengeluaran Daerah
  
- 956        Rekonsiliasi
- 956.1     Surat Rekonsiliasi Penerimaan
- 956.2     Laporan Rekonsiliasi Bank
  
- 957        Laporan Mutasi Penempatan Deposito

958 Surat Perintah Transfer Uang (SPTU)

**960 EVALUASI DAN PENGENDALIAN**

961 Tuntutan Ganti Rugi

962 Tuntutan Perbendaharaan

963 Evaluasi dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota

964 Evaluasi dan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota

965 Edaran-edaran

**970 PENDAPATAN**

971 Perimbangan Keuangan

971.1 Bagi Hasil Pajak

971.11 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

971.12 Bela Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (PBHTB)

971.13 Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH Pasal 21)

971.2 Bagi Hasil bukan Pajak

971.21 Sumber Daya Alam/Migas

971.3 Dana Alokasi Umum

971.4 Dana Alokasi Khusus

972 Subsidi

973 Pajak

973.1 Pajak Kendaraan Bermotor

973.2 Pajak Kendaraan di atas Air

973.3 Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

973.4 Pajak Pengembalian dan Pemanfaatan Air Permukaan

973.5 Pajak Reklame

974 Retribusi

974.1 Retribusi Bidang Kesehatan

974.2 Retribusi Bidang Seni Budaya dan Pariwisata

974.3 Retribusi Bidang Perekonomian, Perindustrian dan Perdagangan (termasuk pasar)

- 974.4 Retribusi Bidang Pertanian dan Peternakan (termasuk pemotongan hewan)
- 974.5 Retribusi Bidang Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Teknologi (termasuk Trayek, Kelebihan Muatan, Telekomunikasi, Parkir dan lain-lain)
- 974.6 Retribusi Bidang Perkebunan dan Kehutanan (termasuk lintas dan lelang hasil hutan, flora fauna dan lain-lain)
- 974.7 Retribusi Bidang Perikanan dan Kelautan
- 974.8 Retribusi Bidang Pertambangan, Pemanfaatan Air Permukaan dan Metrologi
- 974.9 Retribusi Bidang Lainnya (termasuk sampah)
  
- 975 Bea
  - 975.1 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
  - 975.2 Bea Balik Nama Kendaraan di atas Air
  
- 976 Cukai
  - 977 Pungutan
  
- 978 Bantuan
  - 978.1 Bantuan Presiden
  - 978.2 Bantuan Menteri
  - 978.3 Bantuan Gubernur
  
  - 978.4 Bantuan Bupati
  - 978.5 Bantuan Lainnya
  
- 979 Pendapatan Lainnya
  - 979.1 Hasil Penjualan Asset Daerah yang tidak Dipisahkan
  - 979.11 Pelepasan Hak atas Tanah
  - 979.12 Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas
  - 979.13 Penjualan Kendaraan Dinas Roda 2
  - 979.14 Penjualan Kendaraan Dinas Roda 4
  - 979.15 Penjualan Bongkaran Bangunan dan Inventaris
  - 979.16 Penjualan Drum Bekas
  - 979.17 Penjualan Hasil Penebangan Pohon
  
  - 979.2 Penerimaan Jasa Giro
    - 979.21 Jasa Giro Kas Daerah
    - 979.22 Jasa Giro Pemegang Kas
    - 979.23 Jasa Giro Khusus

- 979.3 Penerimaan Bunga Bank
- 979.31 Bunga Deposito
- 979.32 Bunga Tabungan
  
- 979.4 Penerimaan Ganti Rugi atas Kerugian atau Kehilangan Kekayaan Daerah (TP-TGR)
- 979.41 Sumbangan Pihak Ketiga
- 979.42 Sumbangan Pihak Ketiga Kendaraan (Dealer)
- 979.43 Sumbangan Pihak Ketiga Kayu
  
- 979.5 Penerimaan Lain-lain
- 979.51 Penerimaan Kembali Kredit BKK
- 979.52 Ternak tidak Layak Bibit
- 979.53 Sewa Internet
- 979.54 Penerimaan dari Dana Bergulir/Revolving
- 979.55 Kerjasama dengan BUMIDA
- 979.56 Penerimaan DUKS
- 979.57 Tempat Rekreasi Nusa Kambangan
- 979.58 Setoran TP-TGR
- 979.59 Penerimaan Lainnya dari Setda/SKPD
  
- 980 -
- 990 -

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN